

Oposisi Dulu, Berkarya Kemudian / Damayanti Tidak Sendiri

# AKTUAL

Edisi 49 | 10 - 25 Februari 2016



## WAJAH MINYAK DUNIA

Ini adalah akhir dari era *petrodollar*. Harga minyak dunia yang terus turun telah memicu polemik disejumlah negara. Indonesia ada didalamnya. Apa penyebabnya dan bagaimana dampaknya?

ISSN 2337-8395



9 772337 839509

WWW.AKTUAL.COM

LAPORAN UTAMA



# Swastanisasi PLN

... swastanisasi global sejak pasca Perang Dunia sejak 1997, agaknya jadi memasuki zona merah neoliberalisme.

Misalnya, ketika pertumbuhan ekonomi diprediksi bakal mencapai 8 persen per tahun, maka perkiraan pertumbuhan kelistrikan adalah 10 persen. Ini yang disebut dengan parameter kontraksi sebesar 100 persen atau membuat kontraksi kelistrikan sebesar dua kali lipat dari pertumbuhan ekonomi nasional.

... PLN yang sudah merencanakan akan meningkatkan penyediaan tenaga listrik. Kelistrikan ekonomi nasional yang berhasil tersebut berkat terbitnya undang-undang kelistrikan kemudian kelistrikan swasta dengan

**Independence Power Project (IPP)** Maka, hal yang sama ini merupakan prakondisi untuk swastanisasi kelistrikan Indonesia.

Pada tahun 1990-an, PLN atau listrik swasta yang ada pada saat itu adalah listrik swasta yang dikelola oleh perusahaan-perusahaan swasta.

Sebelumnya, PLN memiliki beberapa perusahaan anak perusahaan, seperti PT Palau atau PT Palau Energy Company (PT Palu) milik General Electric (GE) Amerika Serikat), Milihi Corp (Milhi), PT Bata Hutan Rebas.

Namun, itu semua kemudian digabung menjadi satu perusahaan yang bernama PT Palu. Hal ini adalah swastanisasi kelistrikan Indonesia yang sudah merencanakan akan meningkatkan penyediaan tenaga listrik.

... PLN yang sudah merencanakan akan meningkatkan penyediaan tenaga listrik. Kelistrikan ekonomi nasional yang berhasil tersebut berkat terbitnya undang-undang kelistrikan kemudian kelistrikan swasta dengan

kemudian di Alhasil, mencari dan investasi s campur tahapan ekonom sektor Pengg dari pada ke Seba terga energi d

Tentu saja kerja para perancang untuk menerapkan skema dalam meliberalisasi ekonomi di Washington Rencana makro kelistrikan Indonesia, baru menemukan momentumnya privatisasi PLN pada 1997, setahun menjelang kejatuhan Presiden Suharto

Kalau kita menilik kembali aksi subversif korporasi-korporasi energi global AS melalui IMF dan Bank Dunia, sebenarnya mereka sudah mengincar sektor ketenaga-listrikan Indonesia sejak 1970-an. Lagi-lagi Perkins punya cerita menarik tentang Suharto sempat menerapkan Proyek Listrik Masuk Desa atau Prolisdes.

Selain itu, juga melalui skema utang luar negeri dengan dalih untuk meningkatkan rasio elektrifikasi. Selain itu, juga melalui skema listrik, pemerintah Suharto didorong agar membangun Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), tenaga panas bumi (PLTP), tenaga uap dengan bahan bakar batu bara (PLTU), tenaga uap berbahan bakar

**Rencana BUMN**  
Kali skenario bidang Merang Perubah secara be menerapi di sektor k yang tadiny.



Berita teraktual tersaji,  
untuk Anda mengawali hari ...

Info Dan Pemasaran :

☎ 0812 053 8776 (Deddy) | 0838 210 4469 (Ranie) | 0818 2809 41 009 (Rhiza)

✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

🌐 www.aktual.com

**PENDIRI** M Danial Nafis  
**KOMISARIS** Yudi Latif

**PEMIMPIN REDAKSI** Faizal Rizki Arief  
**SEKRETARIS REDAKSI** Tsurayya Zahra  
**REDAKTUR SENIOR** Satrio Arismunandar, Hendrajit, Eko Maryadi  
**SIDANG REDAKSI** Faizal Rizki Arief, Satrio Arismunandar, Hendrajit, Wahyu Romadhony

**REDAKTUR** Wahyu Romadhony, Nebby Mahbubirrahman, Sukardjito, Ismed Eka Kusuma, Tino Oktaviano (Foto)  
**ASISTEN REDAKTUR** Zaenal Arifin, M Vidia Wirawan, Karel Stefanus Ratulangi, Wisnu Yusep, Arbie Marwan, Vivin Sri Wahyuni

**STAF REDAKSI** Soemitro, Fadlan Syam Butho, Nailin In Saroh, Mochammad Zaky Kusumo, Novrizal Sikumbang, Warnoto (TV), Junaidi (Foto), Munzir (Foto), Leonina K Lahama, Eko Sumaryanto (Foto Komersial), Agung Rizki, Dadangsa, Najamuddin Arfah, Refli Mulyadi, Fatah Hidayat Sidik.

**DESAIN GRAFIS** Shofrul Hadi, Nelson Nafis

**NETWORK** Tri Wahyudi (Hd), Rendra Muhammad Nur Islam  
**SMC** Resya Muhammad Irgi, Taufik, Iqbal Maulana

**KONTRIBUTOR LUAR NEGERI** Fitra Ismu (Meksiko)

**REPORTER DAERAH** Masriadi Sambo (Aceh), Damai Oktafianus Mendrofa (Medan), Muhammad Dasuki (Semarang), Ahmat Haris B (Surabaya), Muchammad Nasrul Hamzah (Malang), A, Bobby Andalan (Denpasar), Andri Wawan MS Husen (Palu).

**MANAGER KEUANGAN** Kasep Natakusumah  
**STAF KEUANGAN** Zulkarnain, Vinka H P  
**HRD & KESEKRETARIATAN** Nuryana  
**SIRKULASI** Widhi Maulana, Bayu Aji  
**MARKETING OFFICER** Dedy Kusnaedi, Rhiza Aditya  
**ADMIN MARKETING** Yulita Trinanda Pangastuti

**ALAMAT REDAKSI**  
Graha Aktual: Jl. Tebet Barat VIII no.50 Jakarta Selatan, Indonesia Kode pos: 12810  
Telp. 021 83794508 ( Hunting )  
Fax. 021 83794706

redaksi@aktual.com  
iklan@aktual.com

**aktual.com**  
TERHANGAT TERPERCAYA

**aktual**  
REVIEWS

## Wajah Minyak Dunia



**P**embaca yang budiman. Harga minyak mentah global mengalami penurunan yang sangat menyakitkan buat banyak negara.

Baru kali ini, setelah 11 tahun terakhir, harga minyak anjlok sampai dibawah USD30 per barel. Bagi negara penghasil minyak, ini bukan hanya pukulan tapi sudah jadi ancaman.

Akan halnya Indonesia. Meski Indonesia sudah jadi net importir minyak, namun tekanan harga minyak global ini diperkirakan sudah mulai mengancam ketahanan energi. Kalau dibiarkan tak terkendali maka bisa merusak ketahanan nasional negara ini.

Laporan Utama kali ini, tim

redaksi menyajikan soal ini. Sekadar *early warning* buat pembuat kebijakan agar bersiap dan berjaga agar tekanan turunnya harga minyak global kali ini tidak merusak ketahanan dan keamanan nasional.

Di rubrik politik, polemik kubu Ical dan Agung Laksono di tubuh Golkar tetap jadi sorotan. Kematangan dan kedewasaan Partai Golkar untuk mengurai benang kusut masalah itu masih terus diuji.

Di kasus Damayanti, rubrik hukum menyorot bahwa OTT KPK terhadap politisi itu bisa jadi juga menyeret beberapa nama. Seperti pengalaman beberapa kasus OTT KPK yang telah lalu? Namun pertanyaannya adalah siapa yang akan ikut digaruk KPK setelah Damayanti?

Beberapa tulisan menarik lain juga kami sajikan dalam edisi kali ini untuk Anda nikmati.

Selamat membaca

## LAPORAN UTAMA

### 22 Gejolak Harga Minyak dan Ancaman Global

IEA mengatakan harga minyak yang terus rendah dalam periode panjang akan memicu kekhawatiran terhadap ketahanan energi suatu negara.



### 26 Waspada! Anjloknya Harga Minyak Ancam Indonesia

"Gara-gara minyak dunia anjlok, realisasi PNB (penerimaan negara bukan pajak) 2015 di sektor migas turun," keluh Menkeu, di kantornya.



### 30 Menjaga Keseimbangan di Tali Licin

Pemerintah harus cerdas menyikapi turunnya harga minyak ini, jika tidak ingin terperosok.



### 32 Menelisik Embrio Persekutuan Para Pedagang Uang AS-Inggris Mengatur Sistem Keuangan Global

Uang tidak punya asal-usul, pemodal adalah orang-orang tanpa patriotisme dan tanpa kesusilaan, satu-satunya tujuan utama mereka adalah keuntungan.



## 14 AKTUAL REVIEW

### Papua dan Terungkapnya Skenario Separatisme ala Bilderberg Group

Sulit untuk mendidik ulang orang yang dibesarkan dengan nasionalisme agar bisa menerima gagasan melepaskan sebagian dari kedaulatan mereka menjadi organisasi supranasional. (Pangeran Bernhard, Pendiri Bilderberg Group)

## 18 POLITIK

### Oposisi Dulu, Berkarya Kemudian

Bergabungnya Golkar memunculkan rasa was-was partai barisan pendukung pemerintah. Mereka khawatir pada perombakan Kabinet Kerja Jilid II, kadernya yang duduk di kabinet tergusur untuk mengakomodir bergabungnya Golkar.

## 40 HUKUM

### Damayanti Tidak Sendiri

Di hari yang sama ada empat pihak yang diamankan Satgas KPK. Selain Damayanti, tiga pihak lagi yang dicokok adalah Dessy A Edwin, Julia Prasetyarini dan Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir.

## 44 INTERNASIONAL

### Raja Minyak yang Terancam Bangkrut

Anjloknya harga minyak dunia yang berkepanjangan mengancam ekonomi Arab Saudi. Ditambah lagi "petualangan militer" di Suriah dan Yaman, yang menyedot anggaran. Akibatnya, Saudi menderita defisit anggaran yang besar, dan cadangan devisa pun terkuras.

## 46 LIFE

### 'Serangan' Mematikan LGBT

Parahnya, di media sosial, (khususnya di Twitter, Facebook, dan Path), komunitas LGBT secara terang-terangan melempar kata tidak senonoh (mesum dan jorok) untuk menarik perhatian sesama jenisnya.

## 12 LENSА AKTUAL

### Sembahyang Malam Tahun Baru Imlek 2567



- 3 Tatap Redaksi
- 5 Terkini
- 6 Kaki Hari
- 20 Kilas Politik
- 38 Kilas Ekonomi
- 22 Oase

Lengkapi kebutuhan informasi terkini dengan mengunduh Portal berita Aktual di smartphone Android Anda. Berita tersaji selama 24 jam dalam 7 hari seminggu dengan standar jurnalisme berkualitas yang meliputi berbagai peristiwa nasional maupun internasional.

## Sinyal Kuat Perpanjangan Kontrak, Sudirman Tegaskan Ambil Divestasi Freeport



Sinyal pemerintah akan memperpanjang kontrak karya PT. Freeport semakin kuat, Meskipun masa kontrak perusahaan tersebut akan berakhir dalam waktu relatif tidak lama lagi (2021), namun pemerintah melalui Menteri Energi Sumberdaya dan Mineral (ESDM), Sudirman Said menegaskan akan tetap melakukan divestasi.

“Sejauh ini sikap pemerintah ingin mengambil kesempatan ini untuk memperkuat kehadiran kita sebagai pemegang saham, sehingga yang telah ada 9 sekian persen bisa ditingkatkan menjadi 20 persen pada tahun ini, dan selanjutnya menjadi 30 persen,” ujar Menteri ESDM, Sudirman Said di Balai Kartini Jakarta, Selasa (2/2).

Selanjutnya dia menyatakan bahwa pemerintah secara kolektif harus mengambil keputusan. Dalam waktu dekat, dirinya akan meminta Menko Perekonomian untuk memfasilitasi pertemuan tiga Kementerian agar terjadi sinergis antar Kementerian dalam menyikapi divestasi.

“Kementerian Keuangan, BUMN dan ESDM. Kita akan meminta menko perekonomian untuk memfasilitasi tiga Kementerian supaya ada sinergi untuk menyikapi kesempatan ini,” tuturnya.

Selain itu, dia juga menceritakan bahwa pernah menyatakan di Komisi VII DPR-RI bahwa tugas Kementerian ESDM menjaga agar bidang investasi tetap terjaga dari tata waktu dan substansi.

Seperti yang telah diketahui bahwa pihak Freeport telah mengirim surat penawaran Divestasi 10,64 persen saham Kepada Kementerian ESDM tertanggal Rabu, 13/1.

Dalam kalkulasinya, nilai 100 persen saham PT Freeport Indonesia diklaim mencapai USD16,2 atau setara Rp225,18 triliun dengan kurs Rp 13,900. Dengan demikian, harga dari 10,64 persen saham sebesar USD1,7 miliar atau setara dengan Rp23,63 triliun.

Director and Executive Vice President Freeport Indonesia Clementino Lamury telah menjelaskan bahwasanya penawaran yang diajukan oleh Freeport berdasarkan perhitungan dengan memasukkan asumsi perpanjangan operasi yang akan didapat Freeport setelah 2021.

Selain itu, dia juga telah menghitung investasi yang telah dikeluarkan Freeport sebesar USD4,3 miliar untuk tambang bawah tanah (underground mining), serta rencana investasi yang akan dikeluarkan dari saat ini hingga berakhir kontrak pada 2021. *Ismed*



## Proyek Kereta Cepat, Ada yang Disembunyikan Pemerintah

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra, Ahmad Muzani menduga bahwa ada informasi yang disembunyikan pemerintah terhadap proyek kereta cepat senilai triliunan rupiah tersebut.

“Kami menganggap ada penjelasan yang disembunyikan. Ada penjelasan yang tidak lengkap dan tidak sempurna untuk dijelaskan ke masyarakat, sehingga menjadi sisa masalah di proyek itu,” kata Muzani menjawab pertanyaan aktual.com, di Jakarta, Jumat (5/2).

“Misalnya tentang permodalan, dimana awalnya ‘b to b’, dengan tidak melibatkan anggaran APBN, tetapi baru kita ketahui bahwa sebagian dari anggaran itu harus mendapatkan jaminan dari APBN,” tambahnya.

Bila seperti itu, ia menyakini dalam waktu cepat atau lambat maka proyek tersebut akan menjadi beban bagi anggaran negara. Sehingga, alangkah baiknya Presiden Jokowi menghentikan proyek meski sudah melakukan peletakan batu pertama.

“Belum lagi secara teknis seperti Amdal, dan kami juga mendapatkan penjelasan tentang monopoli penggunaan rel yang tidak sesuai undang-undang kita,” tandas ketua fraksi Gerindra itu. *Karel Stefanus Ratulangi*



# Ruang Publik, Partisipasi dan kekerasan

Ruang publik ideal, dalam pandangan Habermas, adalah domain tempat opini publik terbentuk yang menjamin berlangsungnya komunikasi bebas penguasaan serta argumen yang kritis dan rasional. Para partisipan dalam wacana publik tidak terhambat oleh ketidaksetaraan dan pemaksaan sehingga terjadi proses belajar secara kolektif.

Seiring dengan perkembangan suatu masyarakat dari kehidupan tradisional menuju modern, arena untuk proses belajar kolektif (*collective social learning*) ini beralih dari ikatan-ikatan komunal-tertutup menuju asosiasi-terbuka, dari ikatan-ikatan keturunan dan kasta menuju masyarakat kelas. Bentuk komunikasi dan belajar sosial (*social learning*) yang diciptakan dan dipraktikkan oleh asosiasi-asosiasi awal (masyarakat-masyarakat pencerahan) di Barat, misalnya, menjadi fondasi bagi model masyarakat modern. Model ini disebut "*civil society*" yang selanjutnya membentuk karakteristik-karakteristik asosiasi, kesamaan hak untuk berpikir bebas, berbicara, dan berserikat sebagai basis penciptaan *civil society* tersebut. "Ketika proses belajar yang kompleks ini bisa diorganisasikan, ide tentang organisasi demokratis dari *civil society* semakin dalam ditransformasikan ke dalam suatu postulat organisasi demokratis bagi kesejahteraan masyarakat. Ide ini memuncak pada ide tentang realisasi demokratis bagi kebaikan hidup oleh *civil society* (Eder, 1993: 24).

Dalam konteks Indonesia, Orde Reformasi menjadi momentum bagi keterbukaan ruang publik dan pemberdayaan *civil society*. Hal ini ditandai oleh penguatan kembali hak-hak sipil, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berorganisasi, yang selama Orde Lama dan Orde Baru dikekang oleh negara. Walaupun demikian, nilai-nilai demokrasi tidak bisa ditegakkan dengan mudah di tengah tingkat pendidikan rendah, buruknya situasi ekonomi, dan lemahnya supremasi hukum. Bahkan transisi demokrasi dan reformasi politik tanpa dukungan tertib hukum dan keadilan sosial-ekonomi seringkali dibarengi dengan tindakan-tindakan anarkis, konflik sosial dan kekerasan etno-religius.

Di masa transisi demokrasi, kekuatan *civil society* sangat penting dalam mendukung demokrasi. Namun kekuatan *civil society* tergantung pada persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk perdebatan publik. Dalam ruang publik yang bebas, setiap individu mempunyai posisi yang sama satu sama lain dalam melakukan transaksi-transaksi wacana dan praktik politik tanpa mengalami tekanan dan distorsi. Kedua, keadaan yang demokratis yang memungkinkan adanya kebebasan bagi warga negara, terpeliharanya hak-hak asasi manusia dan ketertiban umum. Ketiga, kuatnya sikap toleran yang memungkinkan adanya saling menghargai setiap perbedaan dan

menghormati aktivitas yang dimiliki orang lain. Keempat, keadilan sosial-ekonomi yang menjadi basis kesetaraan dalam partisipasi politik.

Dengan kata lain, penguatan demokrasi dan *civil society* mengandaikan adanya kebebasan yang bersejalan dengan keadilan. Dalam hal kebebasan, jika pada sistem politik otoritarian, ancaman utama dari *civil society* muncul dari negara, dalam sistem demokratis, ancaman itu justru muncul dari kekuatan-kekuatan *civil society*, yakni berupa kemunculan fanatisisme komunalistik. Fanatisisme merupakan antipoda atas *civil society* karena menolak rasionalitas, prinsip representasi dalam politik serta pemerintahan hukum (konstitusional) sebagai bantalan vital demokrasi. Menurut Huntington, kelompok-kelompok marjinal yang terlempar dari gelanggang politik formal akan mengembangkan fanatisisme dan cenderung bersikap “iri” (*resentment*) terhadap kebebasan, partisipasi dan modernisasi.

Tetapi fanatisisme tidaklah muncul tanpa akar. Ia muncul akibat terganggunya basis-basis keadilan dan distorsi komunikasi dalam ruang publik. Berdasarkan pengalaman, banyak kekerasan dan konflik sosial terjadi akibat ketidakadilan (nyata maupun perseptual) serta deprivasi sosial. Kedua hal ini diakibatkan terutama oleh diskrepansi dalam alokasi sumberdaya baik pada tingkat domestik maupun internasional serta lumpuhnya daya-daya komunikatif karena subordinasi dunia kehidupan (*lifeworld*) oleh dunia sistem.

Tulisan berikut akan memberikan perhatian pada tegangan antara partisipasi (kebebasan) dan fanatisisme dalam ruang publik Indonesia pasca Orde Baru.

### **Trayek Kebebasan dan Partisipasi**

Runtuhnya Orde Baru pada bulan Mei 1998 memberikan harapan bagi tumbuhnya nilai-nilai demokrasi dan penguatan *civil society*. Indonesia memasuki masa transisi menuju

demokrasi. Namun masa transisi bukan berarti Indonesia otomatis menuju negara yang demokratis. Menurut pengalaman transisi di Amerika Latin dan Eropa Timur, transisi mengarah pada tiga kemungkinan: transisi membawa sistem pemerintahan dari sistem otoriter ke sistem pemerintahan demokratis, transisi akan mengarah pada kembalinya sistem otoriter, atau transisi akan tetap bertahan pada keadaan tidak pasti dan jika tidak ada yang bisa mengendalikan keadaan, transisi akan mengarah pada keadaan yang lebih buruk dari sebelumnya. Belajar dari pengalaman negara-negara yang berhasil menggantikan pemerintahan otoriter dengan pemerintahan demokratis, kekuatan *civil society* menjadi sendi utama keberhasilan tersebut.

Masa transisi merupakan proses politik yang kompleks yang melibatkan berbagai kelompok yang berjuang demi kepentingan masing-masing, baik yang mendukung tujuan-tujuan demokrasi atau sebaliknya. Menurut Huntington (1995), seorang ahli politik terkemuka dari Universitas Harvard, para peserta dalam proses transisi dalam gelombang ketiga demokratisasi terdiri dari kelompok konservatif, pembaharu liberal, pembaharu demokratis dalam koalisi pemerintah dan kelompok moderat demokratis serta ekstrimis revolusioner di pihak oposisi. Dalam perjalanan proses transisi terjadi perimbangan kekuatan antara pro dan kontra demokrasi. Jika kelompok konservatif mendominasi pemerintahan dan kelompok ekstrimis mendominasi oposisi, maka demokratisasi mustahil berjalan. Kondisi yang ideal bagi tumbuhnya demokrasi adalah jika kelompok-kelompok prodemokrasi mendominasi pemerintahan maupun mendominasi oposisi. Sementara, jika kelompok prodemokrasi mempunyai posisi kuat dalam pemerintahan dan dalam oposisi lemah, maka upaya demokratisasi terancam oleh kekerasan yang

dilakukan pemberontak dan peningkatan kekuatan konservatif yang sangat memungkinkan terjadinya kudeta.

Lebih dari itu, Huntington menambahkan bahwa demokrasi harus diciptakan melalui perundingan, kompromi, perjanjian, demonstrasi, kampanye, pemilihan umum dan penyelesaian perbedaan tanpa kekerasan. Cara-cara ini mengandaikan adanya pemimpin politik yang berani menentang kekuatan status quo dan mengorbankan kepentingan-kepentingan pengikutnya untuk kepentingan jangka panjang. Selain itu, demokrasi bisa berhasil jika mempunyai para pemimpin, pemerintah dan oposisi yang bisa menahan diri dalam menghadapi kelompok-kelompok radikal dan mempunyai kearifan yang menyadari bahwa dalam politik tak seorang pun memonopoli kebenaran.

Sejak era Pemerintahan Habibie, pelbagai langkah untuk mendemokratisasikan institusi dan prosedur-prosedur politik telah dilakukan dengan sejumlah transformasi yang nyata: pemerintahan terpilih, pemilu yang relatif fair dan berulang, kebebasan berekspresi, keluasan akses informasi (meski belum ada jaminan perundang-undangan), desentralisasi dan otonominasi, pemilihan presiden dan pilkada secara langsung dan sebagainya.

Singkat kata, dari segi-segi prosedur demokrasi, transisi demokrasi Indonesia telah siap untuk dikonsolidasikan. Namun, perkembangan ini hanyalah tahap awal dari proses panjang menuju konsolidasi demokrasi. Tahap konsolidasi menghendaki perhatian pada segi-segi substantif. Karena di benak kebanyakan rakyat yang telah lama mengalami penindasan, ketidakadilan dan kemiskinan, demokrasi melambangkan lebih dari sekadar penghapusan institusi-institusi politik yang represif dan penggantian pemimpin-pemimpin otoriter. Demokrasi

merepresentasikan kesempatan dan sumberdaya bagi perbaikan kualitas hidup serta bagi kehidupan sosial yang lebih adil dan manusiawi. Oleh karena itu, konsolidasi demokratisasi harus menjamin terwujudnya esensi demokrasi: pemberdayaan rakyat (*popular empowerment*) dan pertanggungjawaban sistemik (*systemic responsiveness*).

Konsolidasi demokrasi memprasyaratkan perubahan mendasar berdimensikan struktural dan kultural. Dari sekian banyak prasyarat itu, hal pertama yang harus diwujudkan adalah soal konsensus elit (*elite settlement*). Demokrasi yang terkonsolidasikan adalah demokrasi yang stabil. Salah satu faktor pendukung kestabilan itu adalah persetujuan elite. Upaya ini memerlukan komitmen kuat dari para elite pada kondisi dasar pengkonsolidasian demokrasi. Hal ini melibatkan pengambil keputusan tingkat tinggi, pemimpin organisasi, politisi, petinggi pemerintah, kaum intelektual, pebisnis, dan pembentuk opini. Keyakinan mereka pada demokrasi akan membuat demokrasi berjalan dan menihilkan kemungkinan kembalinya otoritarianisme.

Persetujuan elite adalah hal yang jarang terjadi dan susah dicapai; mendamaikan elite yang berseteru untuk bernegosiasi perbedaan mereka bukan hal gampang. Bila tercapai, menurut Burton dan Higley, ada dua akibat penting, yaitu: (1) terbentuknya pola kompetisi politik damai dan terbuka antara para elite, dan (2) terjadi transformasi ketidakstabilan politik menuju kestabilan berakibat pada rendahnya pengambilan kekuasaan secara paksa dan tak disangka-sangka. Hakekatnya, persetujuan elite mentransformasikan elite berseteru menjadi elite bersatu. Peralihan rejim berakhir pada demokrasi yang langgeng, kemungkinan besar adalah produk konsensus elite ini, sedang yang berujung pada gagal-demokrasi berarti nadir dari konsensus. Konsensus elite sebab itu

merupakan titik kritikal dan penentu bagi demokrasi.

*Elite settlement* merupakan faktor krusial yang memberi andil besar pada kegagalan eksperimen demokrasi Indonesia di masa lalu. Namun, gelombang demokratisasi pada era reformasi ini menunjukkan perkembangan positif dalam kemauan yang lebih luas di kalangan elit politik untuk mencapai konsensus. Pertama, tentu saja adalah konstitusi. Para elite setuju melakukan perubahan cukup mendasar pada konstitusi melalui amandemen beberapa pasalnya, dengan resistensi yang sangat minimal. Kedua, ada kesepakatan dari para pemegang senjata dengan para elite negeri untuk tidak menghalangi atau membatasi proses demokratisasi. Ini tidak dilakukan dengan merubah tradisi dan budaya militer, tapi melalui penekanan pentingnya konsensus elite ini bagi kemaslahatan bangsa. Walaupun masih memiliki modal politik dan posisi tawar yang tinggi, sebagai salah satu aktor terpenting dalam jagat perpolitikan Indonesia, kerelaannya untuk kembali ke barak, menjadi tentara profesional, tunduk di bawah kekuasaan sipil, dan mengawal demokrasi merupakan kontribusi tak ternilai bagi bangsa.

Ketiga adalah desentralisasi dan distribusi kekuasaan politik sebagai upaya menjaga kesatuan negara. Idealnya, proses ini mengantarkan Indonesia pada partisipasi politik masif dan terbesar dalam sejarah Indonesia maupun dunia. Konsensus oleh bangsa ini mengenai bentuk distribusi kekayaan dan kekuasaan merupakan terobosan demokratisasi melalui pendobrakan institusi-institusi pra-reformasi. Meskipun harus segera diberi catatan, bahwa kisruh yang terjadi dalam pilkada di beberapa tempat menyiratkan masih lemahnya daya-daya konsensus elit yang antara lain disebabkan oleh masih lemahnya tingkat erudisi dan budaya politik demokratik, selain segi-segi yang menyangkut kelemahan pranata hukum dan



kesenjangan sosial.

Keempat, tercapai satu kesepakatan diantara para elite individu maupun kolektif untuk loyal pada institusi dan praktik demokrasi. Apapun latar belakang ideologis dan kepentingan mereka, ada semacam kesepakatan bahwa institusi dan praktik demokrasi membantu tercapainya kemaslahatan umum, dan setia pada institusi dan praktik demokrasi ini menjadi kebutuhan dan keniscayaan. Tanpa ada komitmen dan kepercayaan pada demokrasi dari para elite politik, demokrasi hanya akan tinggal wacana.

Terakhir, dan dihubungkan dengan poin keempat, kesetiaan pada praktik dan institusi demokrasi dengan mengabaikan latar belakang ideologis dan identitas, mengantarkan proses pemoderasian pemikiran dan ideologi yang berada di ujung spektrum berbeda. Elite politik yang berseberangan pun pada akhirnya dipaksa oleh keniscayaan sejarah dan kekuatan demokratis untuk melakukan pendekatan dan relasi yang kemudian memoderasi kestatisan dan kekentalan pemikiran dan ideologi mereka. Indonesia dengan lanskap politik yang menghalangi ekstremitas, membuat konflik politik mengambil posisi moderat karena tipisnya perbedaan ideologi yang timbul diantara para pemain politik. Konflik politik yang jamak lahir dari pemikiran dan laku politik ekstrim para pemimpinnya, seiring dengan pergeseran menuju moderasi, mengakibatkan mereka bersedia bernegosiasi dan berkompromi selaras dengan keinginan konstituennya. Moderasi mereduksi potensi konflik.

### Ancaman Kebebasan

Dengan mempertimbangkan capaian tersebut, tampak jelas bahwa salah satu prasyarat ideal untuk memasuki konsolidasi demokrasi seperti yang dibayangkan Huntington di atas dalam derajat tertentu telah hadir. Baik partai-partai pendukung pemerintahan maupun barisan (pseudo) oposisi telah dikuasi

oleh kekuatan-kekuatan (pseudo) prodemokrasi, di mana elit-elitnya bersedia melakukan konsensus minimal untuk hal-hal mendasar dalam rancang-bangun kenegaraan.

Jika itu yang terjadi, ancaman kekerasan politik terutama bersumber dari kelompok-kelompok yang tak punya tempat atau tak mengambil tempat dalam kontestasi politik formal, karena tak mendapat dukungan massa yang signifikan atau karena tak percaya terhadap sistem demokrasi. Seperti halnya dalam pertandingan olah raga, para penonton yang tidak turun ke gelanggang kontestasi inilah yang seringkali menimbulkan kegaduhan, mengembangkan fanatisisme dan menyulut tindak kekerasan.

Fanatisisme yang semakin meruyak dalam dunia kehidupan Indonesia saat ini membawa ancaman serius terhadap kehidupan publik demokratis. Fanatisisme secara jelas menampilkan kemungkinan untuk perbedaan tafsir, menetapkan batas-batas yang tak pernah jelas terhadap ekspresi estetis, memusuhi kepercayaan dan penghayatan keagamaan yang dianggap sesat. Kekerasan yang akhir-akhir ini mewarnai negeri ini adalah buah dari fanatisisme. Fanatisisme lahir dari ketidakpercayaan diri untuk menghadapi perbedaan pikiran, ekspresi kehidupan, kemudian menetapkan segala hal ihwal yang suci dianggap steril, tak pernah terkontaminasi, murni, bahkan ajeg.

Fanatisisme juga memberi halangan terhadap konsolidasi yang mensyaratkan adanya sikap kewargaan yang inklusif. Suatu kesiapan untuk mentransendensikan diri dari perbedaan yang tak terelakkan demi mengutamakan substansi yang mendukung kebajikan bersama. Fanatisisme mengarah pada eksklusivisme yang memandang politik sebagai arena pertempuran, ketibimbang sebagai wahana untuk bernegosiasi dan berbagi.

Lebih dari itu semua, fanatisisme juga merupakan antipoda atas *civil society* karena menolak

rasionalitas sebagai landasan yang bisa menjamin keberlangsungan kehidupan ruang publik. Sejak Pencerahan, ruang publik demokratis bertolak dari rasionalitas sebagai kriteria. Berani berfikir sendiri merupakan diktum Pencerahan yang menggema sejak abad ke-18. Diktum ini selanjutnya menjadi paradigma berpikir yang meresapi semua aspek kehidupan modern. Salah satu tokoh penting Pencerahan ini adalah Immanuel Kant. Bagi Kant, pencerahan adalah terbebasnya manusia dari buaian otoritas di luar dirinya. Manusia adalah subjek yang menentukan diri (*self-defining subject*), bebas dalam menentukan cara berpikir, otonom dalam menentukan tindakan. Modernitas yang ditandai dengan pencapaian subyektivitas menempatkan manusia berdiri sejajar di atas permukaan bumi atau kosmos. Dengan demikian, setiap orang berhak menentukan pendapat dan pilihannya sendiri tanpa ancaman dari otoritas luar.

### Akar Fanatisisme

Tetapi fanatisisme tidaklah muncul tanpa akar. Ia muncul akibat terganggunya basis-basis keadilan (hukum, ekonomi, sosial dan budaya) dan distorsi komunikasi.

Keadilan hukum terganggu ketika warga negara diberi perlakuan yang berbeda atau tak diberi perlindungan atas hak-hak sipil dan politiknya. Jika warga negara gagal memperoleh perlindungan dari negara, secara alamiah mereka akan mencari perlindungan dari sumber-sumber yang lain. Sumber-sumber alternatif ini bisa dalam bentuk premanisme, koncoisme, etnosentrisme, kelompok-kelompok keagamaan eksklusif dan seterusnya.

Ketidakadilan ekonomi berperan besar dalam menyulut fanatisisme. Demokrasi tidak melulu berhubungan dengan politik.

Fanatisisme berkembang subur saat berhadapan dengan ketimpangan ekonomi-politik. Ketimpangan ini terjadi baik karena

warisan aneka diskriminasi kolonial maupun rejim-rejim otoriter pasca-kolonial. Tetapi sumber ketimpangan sosial-ekonomi baru yang tak kalah pentingnya adalah konsekuensi dari globalisasi dan penetrasi kapitalisme. Di Indonesia, pergeseran ke arah sistem politik demokratis yang membawa serta gelombang aspirasi neo-liberal dalam perekonomian terjadi ketika tradisi negara kesejahteraan belum berjejak. Penetrasi kapital dan kebijakan pro-pasar di tengah-tengah perluasan korupsi serta lemahnya regulasi negara dan pelaku ekonomi “kebanyakan”, memberi peluang bagi bersimaharajalelanya “predator-predator” raksasa, yang secara cepat memangsa pelaku-pelaku ekonomi menengah dan kecil. Ekspansi kepentingan predator besar ini tak berhenti pada dunia usaha, melainkan juga menyusup ke soal perumusan perundang-undangan bahkan sampai pada pemilihan pejabat pemerintah di daerah.

Globalisasi dan perluasan ekonomi pasar tidak selalu memberi kabar gembira. Bagi kebanyakan masyarakat terbelakang, keduanya lebih sering membawa bencana. Globalisasi adalah anak kandung modernitas, sedangkan modernitas adalah kelanjutan proyek Pencerahan yang belum selesai. Proyek Pencerahan ini mengandaikan kepercayaan kepada prinsip-prinsip universal, karena prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dalam situasi lintas sejarah dan budaya dengan segala keunikannya. Prinsip yang bertumpu atas dasar universalitas ini seringkali tidak mewartakan semua keinginan dan harapan warga dunia sehingga acapkali melahirkan kekerasan. Kekerasan adalah respon balik yang muncul sebagai gerakan protes oleh sebagian kalangan terhadap upaya globalisasi seluruh tatanan; politik, sosial, ekonomi, budaya, bahkan agama. Globalisasi untuk sebagian masyarakat lebih merupakan ancaman daripada peluang. Peluang dan ancaman memang paradoks yang menandai

globalisasi. Di satu sisi, globalisasi telah banyak memberi kemudahan terpenuhinya segala kebutuhan manusia serta membuka peluang kompetisi di masa depan. Di sisi lain, globalisasi telah menciptakan ketidakadilan distributif dan tercerabutnya manusia dari akar eksistensinya.

Globalisasi, demikian Habermas, merupakan keniscayaan sejarah, tetapi juga telah menginjeksikan kepalsuan dalam spiral komunikasi sehingga dalam praktiknya sering melahirkan distorsi komunikatif. Resistensi dari sebagian kelompok tertentu bahkan memanifestasi dalam tindakan teror berasal dari distorsi komunikasi. Globalisasi secara kejam telah membagi dunia ke dalam kelompok pemenang dan pecundang. Analisis Habermas ini melanjutkan proyek Sekolah Frankfurt dalam mendiagnosa patologi yang mengidap masyarakat modern. Patologi itu berupa distorsi komunikasi dalam masyarakat global. Diagnosa terhadap patologi modernitas ini penting diajukan bukan untuk mengafirmasi globalisasi, tetapi untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang berbahaya yang dikandungnya, salah satunya adalah terorisme. Terorisme berjalın-berkelindan dengan pemahaman fanatis-dogmatis dalam menafsirkan doktrin-doktrin agama ketika merespon modernitas. Fundamentalisme adalah reaksi terhadap kegagalan sekularisasi dan ekstensifikasi rasionalitas instrumental atas dunia kehidupan (*Lebenswelt*), sekularisasi telah mencerabut bentuk-bentuk kehidupan tradisional mereka. Ketercerabutan yang diikuti oleh homogenisasi budaya juga identitas membuat para individu di dalam masyarakat mengalami keterasingan dari komunitasnya. Fundamentalisme menemukan bentuknya yang paling ekstrim dalam tindakan teror. Terorisme secara eksklusif bersifat modern. Fundamentalisme bukanlah gerak kembali yang sederhana kepada

suatu cara yang pra-modern dalam memahami agama, tetapi lebih sebagai respon panik dan gagap menghadapi modernitas dan globalisasi. Kepanikan ini ditandai dengan resistensi diri terhadap prinsip-prinsip kehidupan global. Resistensi diri ini termanifestasi dalam sikap religius yang berlebihan dan menutup kemungkinan komunikasi dengan dunia luar. Terputusnya komunikasi inilah yang melahirkan kekerasan dalam wujud tindakan teror. Dalam konteks demokrasi global, terorisme memiliki dimensi politik yang berbeda dengan tindak kekerasan biasa, karena sifatnya yang mampu mendelegitimasi pemerintahan demokratis.

Habermas membantah hipotesis Huntington tentang pergeseran penting sifat-sifat konflik yang menandai globalisasi. Konflik peradaban, dalam hipotesis Huntington, tidak terjadi karena perbedaan ideologi dan ketidaksetaraan ekonomi, tetapi karena motif-motif budaya dan agama. Menurut Habermas, distorsi komunikasi sebagai akibat globalisasi tidak bersifat kultural dan agama, melainkan ekonomi, meskipun kemudian melahirkan gerakan protes atas nama agama. Ini dapat dilihat dari koalisi negara-negara Barat yang hanya memfokuskan diri pada strategi ekonomi pasar. Penekanan pada strategi ekonomi pasar menyuburkan konsumerisme, selanjutnya melahirkan ledakan di tengah lapisan penduduk dunia yang merasa paling dirugikan. Ledakan akibat konsumerisme membangkitkan reaksi spiritual sebagian kalangan sebagai satu-satunya alternatif mengatasi masalah global. Argumentasi Habermas ini beranjak dari pemilahannya atas kehidupan modern ke dalam distingsi antara dunia sistem dan dunia kehidupan. Dengan dunia sistem, Habermas menunjuk pada institusi atau konstitusi-konstitusi yang ada dalam masyarakat,

sementara dunia kehidupan adalah praktik-praktik komunikasi yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Melalui distingsi ini, Habermas hendak membersihkan praktik-praktik komunikasi yang berlangsung dalam dunia sehari-hari dari kolonisasi dunia sistem. Kolonisasi dunia kehidupan oleh sistem dapat mendistorsi aktivitas komunikasi dalam masyarakat. Sejalan dengan asumsi ini, globalisasi telah memanipulasi atau mendistorsi praksis komunikasi dunia sehari-hari tersebut ke dalam sistem.

### Penutup

Orde Reformasi sesungguhnya memberikan tanggung jawab yang besar kepada masyarakat karena pemerintah tidak lagi menjadi pengatur dan “penjaga malam”. Warga masyarakat, baik yang terpaut dengan political society maupun *civil society* dituntut untuk memelihara ruang publik dan kebebasan sambil tetap menjaga perhatian pada kebajikan bersama. Kegagalan kita dalam menempatkan ruang publik sebagai satu-satunya institusi definitif dalam demokrasi modern akan berakibat fatal, yaitu kematian *civil society*. Sudah tak terhitung berapa buku yang dilarang, para pejuang demokrasi terbunuh di ujung laras bedil kaum fanatik, dan kegiatan kesenian yang dibubarkan tanpa suatu argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tetapi kebebasan dan ruang publik harus dikelola secara dewasa. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengorganisir kebebasan memunculkan kekhawatiran terjadinya “kebebasan yang kebablasan”, yang mengandung ancaman terjadinya anarki. Inilah yang dicemaskan banyak pihak, bahwa kebebasan tidak dibarengi dengan prinsip tanggung jawab.

Dalam kaitannya dengan tanggungjawab ini, perlu diingat pula bahwa kebebasan bukanlah udara bebas yang senantiasa bisa dihirup tanpa pengorbanan.

Ia harus diperjuangkan dengan menegakkan keadilan. Demokrasi haruslah dimaknai sebagai kesetaraan, karena kesetaraan pada hakikatnya mengandaikan terciptanya kebebasan. Lebih lanjut, egalitarianisme berusaha mengambil konsepsi tentang demokrasi dari prinsip kesetaraan antar-sesama manusia karena, berdasarkan pengalaman, setiap konflik yang terjadi adalah akibat ketaksetaraan antar-mereka. Faktor kebebasan dan persamaan merupakan sesuatu yang penting dalam demokrasi. Dua persoalan ini menjadi penting mengingat keduanya merupakan modal bagi sebuah kemajuan. Kebebasan merujuk kepada kebebasan bekerja, kebebasan bersikap sesuai dengan kadar kemampuannya, dan kebebasan berfikir. Membahas indikator ini tidak akan terlepas dari upaya pemerintah dan otoritas internasional dalam menjamin hak-hak sipil tersebut. Namun yang terpenting adalah bahwa kebebasan tidak boleh diterjemahkan sebagai bebas bertindak sesuka hati tanpa memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Konsolidasi demokrasi di Indonesia akan berhasil jika kita berhasil mengeloa tuntutan kebebasan dan keadilan. Jika keduanya tak berjalan berkelindan, ancaman yang akan kita hadapi tidak saja soal disintegrasi sosial, tapi juga akan hancurnya kerekatan sosial (*social bond*) dalam masyarakat. Bila kerekatan sosial hancur, akan tumbuh social distrust (iklim tidak saling mempercayai) di antara kelompok-kelompok sosial, sehingga kelompok yang satu dengan yang lainnya dalam masyarakat akan saling curiga, saling bermusuhan atau bahkan, yang paling mengerikan, adanya upaya untuk saling meniadakan. Dalam situasi ini, tawuran massal gaya Thomas Hobbes, *war of all againts all*, bukan lagi mitos. Dengan ini, kita sadar, betapa pentingnya membuka diri penuh cinta untuk yang lain. ◦



**LENSA AKTUAL**

## **Sembahyang Malam Tahun Baru Imlek 2567**

Sembahyang jelang tahun baru Imlek 2567 itu sebagai ungkapan syukur atas segala rejeki dan keselamatan dari Tuhan serta untuk pengharapan kehidupan lebih baik di tahun monyet mendatang.

Munzir - Tino Oktaviano



Daniel Estulin



# Papua dan Terungkapnya Skenario Separatisme ala Bilderberg Group

Sulit untuk mendidik ulang orang yang dibesarkan dengan nasionalisme agar bisa menerima gagasan melepaskan sebagian dari kedaulatan mereka menjadi organisasi supranasional. (Pangeran Bernhard, Pendiri Bilderberg Group)

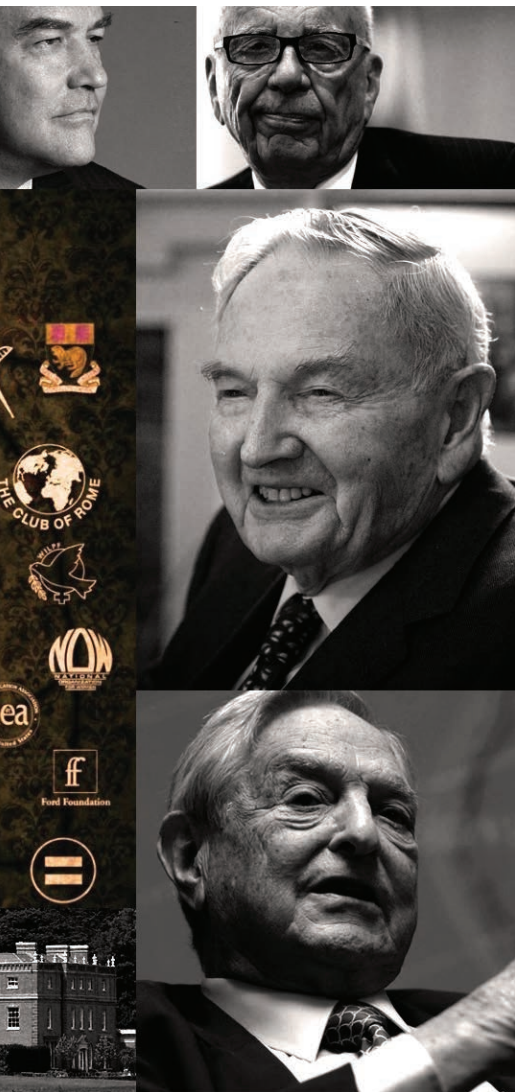
**K**unjungan mendadak Duta Besar Amerika Serikat dan Kerajaan Inggris di Indonesia, ke Papua beberapa waktu

lalu, mengingatkan kita betapa yang namanya dukungan internasional terhadap gerakan untuk memisahkan diri dari negara induknya, ternyata

bukan cerita fiksi atau rekanaan belaka. Tapi memang nyata adanya. Demi untuk mewujudkan Pemerintahan Satu Dunia di bawah kendali Inggris dan Amerika Serikat, Bilderberg tak segan-segan mendukung kelompok-kelompok separatis memisahkan diri negara induknya.

Menyimak kembali cerita Daniel Estulin melalui bukunya bertajuk *The True Story of Bilderberg Group*, saya jadi terhenyak. Jangan kata Papua, yang meski kaya kandungan sumberdaya alamnya di Pegunungan Ersberg dan Grasberg, namun tetap saja masuk kategori negara Dunia Ketiga.

ILUSTRASI NELSON AKTUAL



mengendalikan pemerintahan di Amerika Serikat dan Eropa Barat dari belakang layar, mengungkap sebuah penggalan kisah yang cukup menarik terkait skenario separatisme Kanada yang disponsori oleh Amerika dan Inggris.

Konferensi Tahunan the Bilderberg Group 1996 itu dipusatkan di Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) Centre, di dekat King Township, di dekat King City. Bagi Estulin, Konferensi Bilderberg Group 1996 kali ini, benar-benar mengusik naluri jurnalistiknya karena terbetik kabar berdasarkan informasi dari sumber-sumbernya yang berhasil mengakses ke dalam forum pertemuan tersebut, bahwa konferensi 1996 akan digunakan sebagai “Panggung” untuk memecah-belah Kanada. Skenario membelah Kanada momentumnya akan dimulai melalui Unilateral Declaration of Independence di Quebec yang menurut skenarionya akan diluncurkan pada 1997. Jadi, setahun setelah berlangsungnya Konferensi the Bilderberg Group.

Deklarasi tersebut akan membagi Kanada, sehingga melalui politik pecah belah itu, Amerika dan Kanada dapat dipersatukan dalam skema “Persatuan Benua” pada 2000. Namun persekongkolan jahat tersebut terbongkar berkat kegigihan

Estulin dalam menginvestigasi sepak-terjang para pentolan the Bilderberg Group.

Namun sekelumit cerita soal skenario separatism di Kanada itu, bukan kasus satu-satunya. Juga pada 1996 yang berlanjut hingga pertemuan Bilderberg pada 1998, terungkap bahwa terpecah-belahnya Yugoslavia pasca wafatnya Joseph Broz Tito memang hasil rancangan para pemrakarsa Bilderberg Group. Sasaran utama waktu itu adalah terciptanya Kosovo Merdeka, yang kemudian disusul dengan upaya membentuk Negara Albania. Seraya memecah-belah, dengan mengembalikan provinsi utara Yugoslavia yang memiliki 350.000 etnik Hongaria, ke Hongaria, sebagai bagian dari pembuatan kembali perbatasan-perbatasan di wilayah tersebut. Tujuan tersamarnya adalah, menciptakan konflik yang berkelanjutan sehingga tercipta ketidakstabilan politik secara regional di kawasan tersebut.

Melalui serangkaian temuan Estulin itu, maka kunjungan Duta Besar Inggris dan AS ke Papua beberapa waktu lalu, menyusul kisruh perpanjangan kontrak Freeport hingga menyeret-nyeret beberapa elit politik pemerintahan Jokowi maupun DPR, nampaknya tidak bisa dipandang enteng. Karena temuan Estulin terkait Bilderberg dalam merancang pecahnya Kanada maupun Yugoslavia, dan bahkan dukungan strategis kelompok ini terhadap serangan militer Presiden George W Bush ke Irak pada 2003, dukungan internasional terhadap gerakan separatisme di beberapa negara, nampaknya bukan cerita fiksi belaka. Namun memang nyata adanya.

### **Meneropong Anatomi Politik Bilderberg Group**

Siapa saja yang memainkan peran penting dalam pagelaran Konferensi Tahunan the Bilderberg 1996 di Toronto, Kanada tersebut? Antara lain William Perry, yang ketika itu masih Menteri Pertahanan Amerika

Di Kanada, salah satu negara makmur di Benua Amerika, sempat juga jadi sasaran Amerika Serikat dan Inggris untuk dipecah-belah antara wilayah yang berpenduduk berbahasa Inggris dan Perancis. Meski akhirnya tertunda, gara-gara bocor ke tangan pers.

Hal ini bermula ketika pada Mei 1996, Daniel Estulin, seorang wartawan investigasi asal Rusia, datang ke Kanada untuk meliput Konferensi Tahunan The Bilderberg Group.

Estulin, yang selama 15 tahun menginvestigasi sepak-terjang the Bilderberg Group, berikut para tokoh-tokoh pentingnya, yang



Serikat, Jean Chretien, Perdana Menteri Kanada waktu itu, mantan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger, Ketua Kehormatan Fiat Giovanni Agnelli, Menteri Keuangan Kanada kala itu (yang kelak jadi Perdana Menteri Kanada) Paul Martin, Komisaris Eropa Mario Monto, David Rockefeller dari Chase Manhattan (namun sosok satu ini sejatinya merupakan pemain politik penting mewakili kepentingan-kepentingan strategis Dinasti Bisnis Rockefeller), George Soros, Pangeran Belgia, Ratu Belanda dan Spanyol, berikut para politisi, pebisnis dan kaum elite akademisi dari beberapa perguruan tinggi kelas dunia. Bukan itu saja. Juga hadir pimpinan Ford Motor Company, Xerox, Bank of Commerce dan Kantor Berita berpengaruh Reuters.

Naluri jurnalistik Daniel Estulin mengatakan, Konferensi Bilderberg Group 1996 bukanlah konferensi biasa. Seperti penulisan Estulin kemudian, terungkap bahwa Kanada, yang merupakan salah satu negara

terkaya di dunia, menurut rencana akan dipecah secara sewenang-wenang oleh para anggota Bilderberg dan New World Order (Tata Dunia Baru).

Namun rencana itu seperti yang saya katakan tadi, terbongkar pada Mei 1996, berkat liputan investigatif Estulin yang kemudian disebarluaskan pula oleh beberapa media setempat seperti *Toronto Star*. Sedemikian rupa gencarnya liputan pers, sehingga Kissinger sempat berangkat dan sempat memakimaki Perdana Menteri Kanada Jean Chretien. Kissinger dengan berangkatnya mengatakan, Chretien akan dikutuk bila sampai ada orang yang menghancurkan rencana pemisahan tersebut.

Bahkan David Rockefeller, yang dikenal sebagai aktor belakang layar dalam mengendalikan para pemain kunci di Gedung Putih maupun gedung kongres the Capitol Hill, sampai-sampai menarik salah seorang konglomerat media Kanada Conrad Black, dan bertanya apakah

bisa mengandalkan dirinya agar bisa membungkam beberapa media arus utama Kanada agar tidak membongkar rencana Amerika dan beberapa pemain kunci korporasi global untuk memecah-belah beberapa wilayah Kanada.

Namun, terbongkarnya rencana *separatism* Kanada pada Konferensi the Bilderberg Group 1996, memang hanya sekadar tertunda. Hasrat untuk melancarkan gerakan *separatism* terhadap Kanada maupun negara-negara lain di pelbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, tetap tidak mati seiring gagalnya skenario 1996.

Berdasarkan investigasi Daniel Estulin, Bilderberg hakikinya sama dengan Pemerintahan Satu Dunia (One World Government). Suatu kelompok rahasia yang terdiri dari para mantan presiden maupun presiden yang masih menjabat, perdana menteri, para banker internasional, para anggota teras kerajaan, serta orang-orang yang mengelola perang maupun pasar modal dan keuangan global.



Pada intinya, Bilderberg Group, merupakan sebuah organisasi paling rahasia, dan keberadaannya menyebar di mana-mana sehingga tidak mudah diekspos. Sedemikian rupa mereka ini berpengaruh, sehingga organisasi dunia yang terdiri dari para pialang kekuasaan, sanggup untuk menggulingkan seorang kepala negara atau pemerintahan, maupun sebaliknya, memunculkan ketokohnya di pentas politik.

Salah satu aktor penting Bilderberg adalah Pangeran Bernhard dari Kerajaan Belanda, karena melalui sosok inilah, untuk pertama kali diminta mengadakan pertemuan perdana para wakil rakyat dari semua segi bidang yang meliputi ekonomi, politik, industri, dan militer dunia yang dipandang sevisi dalam mengembangkan gagasan Pemerintahan Satu Dunia alias One World Government.

Tapi, Pangeran Bernhard, hanya salah satu pemain ujung tombak belaka. Bilderberg Group sejatinya dimotori oleh keluarga Rockefeller. David Rockefeller, Rupert Murdoch, Paul Wolfowitz, Romano Prodi, dan Henry Kissinger, merupakan sebagian tokoh dunia yang menjadi anggotanya. Pertemuan kelompok ini sejak dirintis pada 1954 di Hotel Bilderberg di Oosterbeek, Belanda, hingga kini, selalu dihadiri oleh orang-orang berpengaruh, seperti Presiden IMF, Bank Dunia, dan Federal Reserve. Serta beberapa perusahaan besar seperti Daimler Chrysler, Coca-Cola, British Petroleum, Chase Manhattan Bank, American Express, Goldman Sach, dan Microsoft. Selain tentu saja para wakil presiden dari Amerika Serikat, CIA dan FBI, Sekjen NATO, dan para anggota senat dan Kongres, perdana menteri dari Eropa. Bahkan tidak ketinggalan, para editor dan CEO beberapa media terkemuka di dunia.

Misi utama Bilderberg bisa dilacak melalui pertemuan-pertemuan para anggota pendiri. Berdasarkan penelisikan Estulin dari beberapa sumber terpercaya

di lingkaran dalam, niat setiap dan semua pertemuan Bilderberg adalah untuk menciptakan aristokrasi yang mengikat kepentingan strategis Eropa dan Amerika Serikat. Serta menyamakan sikap atas beberapa kebijakan ekonomi dan strategi dalam mengatur dunia secara bersama. Lahirnya Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO), merupakan landasan operasional mereka yang sebenarnya bersifat *subversive*, untuk melayani kepentingan global para pemrakarsa Bilderberg.

Temuan Estulin yang menarik adalah laporan berkala Oktober 1967 berdasarkan laporan penyelidikan politik Roger Mennevee mengenai hubungan antara Presiden Perancis Charles de Gaulle dan Bilderberg. Menurut analisis Mennevee, bahwa semua figur Perancis yang mengaitkan dirinya dengan Bilderberg Group seperti George Pompidous, Antoine Pinay, dan Guy Mollet, ternyata merupakan lawan politik de Geulle terkait kebijakan nuklir Charles de Gaulle. Pantas saja, kalau kita kaji pemerintahan Perancis pada era de Gaulle, hubungan Perancis dengan persekutuan Anglo Saxon seperti Inggris dan Amerika, memang boleh dibilang “dingin” atau tidak bersahabat. Dari cerita latarbelakang yang disampaikan Estulin, sekarang jadi jelas penyebab utamanya sangat prinsipil, bukan sekadar sentimen pribadi antar beberapa pemimpin Eropa dan Amerika.

Bisa dimengerti jika de Gaulle sangat menentang skema Bilderberg. Karena dari penelisikan secara lebih dalam, aliansi ini dibentuk atas dasar sasaran strategis untuk memasukkan kedaulatan negara-negara merdeka di Eropa ke dalam skema Pemerintahan Satu Dunia Inggris-Amerika, yang dikendalikan oleh Bilderberg Group. Di sinilah de Gaulle menentang skema Bilderberg tersebut, terutama melawan orientasi perdagangan bebas milik Inggris dalam kerang Tata Pemerintahan Satu Dunia.

Salah satu instrument untuk mengoperasionalkan skema kendali

ekonomi melalui perdagangan dunia adalah NAFTA (North America Free Trade Agreement). Maka David Rockefeller, salah satu yang punya hajat untuk urusan ini, kemudian merekrut Gubernur Arkansas yang waktu itu tidak terlalu populer, Bill Clinton. David Rockefeller, mengajak Clinton untuk menghadiri pertemuan Bilderberg di Baden-Baden, Jerman, pada 1991. Di sana, David Rockefeller mengatakan kepada Clinton bahwa NAFTA merupakan prioritas Bilderberg dan bahwa kelompok tersebut membutuhkan Clinton mendukung mereka. Setelah kemudian, Clinton terpilih sebagai presiden. Dan dirinya, termasuk pendukung kuat untuk NAFTA.

Bukti nyata Bilderberg bisa memasang sekutu-sekutunya di pucuk tertinggi pemerintahan suatu negara bisa ditelisik kembali melalui beberapa fakta berikut ini:

1. Bill Clinton, menghadiri pertemuan Bilderberg pada 1991, lalu memenangi pemilu presiden AS melalui Partai Demokrat pada 1992.
2. Blair, menghadiri pertemuan Bilderberg pada 1993, lalu pada Juli 1994 berhasil terpilih sebagai Perdana Menteri Inggris, dan terpilih kembali pada Mei 1997.
3. Robertson, menghadiri pertemuan Bilderberg pada 1998. Lalu setahun kemudian, ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal NATO pada Agustus 1999.
4. Romano Prodi, menghadiri pertemuan Bilderberg pada 1999, lalu disumpah sebagai Presiden Eropa pada September 1999. Masa baktinya bertahan hingga 2005. Pada 2006, Prodi dipilih sebagai Perdana Menteri Italia.

Begitulah. Misi besar Bilderberg adalah memegang kendali ekonomi terhadap perdagangan dunia. Dan kata kunci mereka untuk mengontrol adalah kerahasiaan. ◦ Hendrajit

Bergabungnya Golkar memunculkan rasa was-was partai barisan pendukung pemerintah. Mereka khawatir pada perombakan Kabinet Kerja Jilid II, kadernya yang duduk di kabinet tergusur untuk mengakomodir bergabungnya Golkar.

**K**etua Umum Golkar Aburizal Bakrie telah menyiapkan beberapa nama yang akan disorongkan ke Presiden Jokowi menjadi menteri. Konsesi atas dukungan kepada kepada pemerintah itu disebut sebagai bentuk tanggungjawab bagi jalannya pemerintahan yang lebih stabil ke depan.

Nama yang diajukan partai berlambang pohon beringin belum akan dibuka sampai pada waktunya, *reshuffle* Kabinet Kerja Jilid II. Ditangan Ical, nama calon menteri masih ditutup.

Selain konsesi kursi menteri, pemerintah juga memberikan kemenangan bagi Golkar kubu Ical. Melalui Menkumham Yasonna Laoly, pemerintah mengeluarkan surat perpanjangan kepengurusan Golkar hasil Musyawarah Nasional (Munas) Riau 2009.

Merujuk Munas Riau, kepengurusan Golkar tercatat Aburizal Bakrie duduk sebagai Ketua Umum, Agung Laksono sebagai Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dijabat Idrus Marham.

Perpanjangan kepengurusan Golkar hasil Munas Riau ini secara langsung memberikan keleluasaan bagi Ical menyelesaikan konflik internal partainya. Yakni dengan menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).

Nah, khusus untuk konsensi menteri, Golkar mengaku tidak ambil peduli dengan kemungkinan tergusurnya kursi menteri dari partai pendukung pemerintah pendahulu. Sebab Presiden Jokowi sendiri yang akan memutuskannya.



## Oposisi Dulu, Berkarya Kemudian

“Golkar berkepentingan ikut berperan bersama Pemerintah manakala kadernya diminta untuk memperkuat formasi kabinet kerja. (Disitu) Pak Ical sudah siapkan nama tapi saya enggak tahu siapa namanya,” kata Bendahara Umum Golkar, Bambang Soesatyo, Rabu (27/1) pekan lalu.

“*Reshuffle* kan bukan urusan kita, itu derita partai lain. Jokowi (kan) sedang membangun peta politik baru di luar KIH dan KMP. Dia udah dapat PAN dan sekarang Golkar,” sambungnya.

Sikap politik yang diambil Golkar dinilai mengingkari komitmennya sebagai partai diluar pendukung pemerintah. Akan tetapi pucuk pimpinan partai tersebut sebelumnya di Rapimnas menepis penilaian tersebut.

Sebab dukungan yang diberikan semata untuk membantu pemerintah dalam membangun negeri tercinta. Hal itu kembali dipertegas kadernya, Adies Kadir.

Adies mengakui, dukungan yang diberikan kepada pemerintah bukanlah gratisan. Ada kepentingan yang menyertainya. Namun bukan berarti menjilat ludah sendiri, melainkan sikap dinamis Golkar dalam berpolitik.

“Tidak ada yang namanya politik itu menjilat ludah, politik itu cair, mengikuti perkembangan,” kata anggota Komisi III DPR itu.

“Kalau hari ini kita punya kepentingan, kemudian kita berseberangan, berarti kan kepentingannya lain. Kita berpisah dulu, nanti ketika kepentingan sama, kita bersama lagi



berbarengan,” tambahnya.

### Spekulasi Pendahulu Golkar

Bergabungnya Golkar memunculkan rasa was-was partai barisan pendukung pemerintah. Mereka khawatir pada perombakan Kabinet Kerja Jilid II, kadernya yang duduk di kabinet tergusur untuk mengakomodir bergabungnya Golkar.

Barisan partai yang sejak awal menyatakan dukungannya terhadap pemerintah itu adalah PDI Perjuangan, Nasdem, PPP, Hanura dan PKB. Mereka tergabung dalam koalisi Kerja Sama Partai Politik Pendukung Pemerintah (KP4) dari sebelumnya bernama Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Untuk diketahui, pada pekan kedua Agustus 2015 lalu, Presiden sudah merombak susunan Kabinet Kerja I. Tercatat ada empat menteri dan seorang pejabat setingkat menteri dicopot, satu lainnya dimutasi ke posisi berbeda.

Berkaca dari perombakan pertama itu, partai KP4 kini ramai-

ramai menyatakan penolakannya terhadap kemungkinan kadernya tergusur dari kabinet.

Ketua DPP PDI-P Trimedya Panjaitan menyambut baik dukungan yang diberikan Golkar ke pemerintah. Sebab bergabungnya Golkar memperlancar program kerja dan kebijakan pemerintah, khususnya ketika harus mendapatkan persetujuan dari parlemen.

Akan tetapi, Wasekjen Ahmad Basarah menekankan kelancaran kerja pemerintah ini tetap berada ditangan Jokowi. Apakah nantinya mantan Walikota Solo itu mampu mengelola dukungan yang diberikan Golkar secara positif.

Salah-salah, bila tidak mampu mengelolanya dengan baik malah bisa menjadi blunder, berdampak negatif bagi pemerintahan Jokowi sendiri. Di sisi lain, Basarah berharap dukungan Golkar didasari niat baik untuk menyukseskan pemerintah.

Bagaimana soal konsesi menteri bagi Golkar? PDIP mengaku tidak ambil pusing dengan hak prerogratif presiden tersebut. Namun partainya menolak jika konsesi kursi menteri bagi Golkar diambil dari PDIP.

“Enggaklah, pasti enggak, masa dikurangi cuma sedikit begitu, dikurangi lagi, habislah,” kata Trimedya Kamis pekan lalu.

PKB menolak kursi yang diberikan Golkar diambil dari partainya. Sekjen PKB Abdul Kadir



Karding menyebut banyak pos lain yang bisa diberikan ke Golkar, tanpa harus merebut kursi menteri dari partainya.

“Bagi kami, pendukung pemerintah, senang-senang saja karena pemerintah jadi kuat, kita enggak capek. Soal jatah-jatah Pak Jokowi saya kira proporsional, siapa bekerja siapa yang tidak bekerja,” kata dia.

Partai Hanura lebih keras lagi. Selain menolak jatah kursinya direbut, partai pimpinan Wiranto itu juga mengingatkan agar Golkar tidak mengintervensi Presiden Jokowi terkait komposisi kabinet paska menyatakan dukungannya ke pemerintah.

Golkar semestinya menyerahkan sepenuhnya dapat tidaknya kursi menteri, seperti sikap yang diambil Hanura selama ini. Bagaimanapun hak perombakan kabinet sepenuhnya ditangan Presiden.

“Semua parpol harus menahan diri untuk tidak intervensi apalagi tekan-tekan Presiden,” kata Ketua DPP Hanura Dadang Rusdiana.

PPP kubu Romahurmuziy yang mendapatkan jatah Kementerian Agama tidak rela jika kader terbaiknya di Kabinet Kerja diambil Golkar. Bila yang diambil bukan dari partai berlambang Kabah itu tidak masalah. Misal menteri dari kalangan profesional.

“Kalau sepanjang bukan jatahnya PPP yang digantikan ke Golkar, kan boleh aja,” kata jubah F-PPP Arsul Sani, Jumat pekan lalu.

“Kan masih kurang dari separuh pos kabinet sekarang itu bukan diisi dari parpol. Kita yakin yang dari parpol itu tidak akan kemudian dihilangkan,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Platte mengaku partainya tidak memperlakukan jika nantinya Golkar mengambil jatah menteri. Partai pimpinan Surya Paloh itu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden.

“Nasdem menyerahkan semuanya ke Presiden. Kalau Nasdem kan mendukung pemerintah tanpa syarat,” ucapnya. ◦ Soemitro

## Gerindra Ingatkan Jokowi Soal Rekomendasi DPR Pecat Rini Soemarno



Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade, mengingatkan Presiden Joko Widodo agar membangun komunikasi dengan DPR RI. Andre mengingatkan demikian sejalan dengan rapat dengar pendapat Komisi VI dengan Kementerian BUMN yang tidak dihadiri langsung oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Pasca rekomendasi dari Pansus Pelindo II dan dari hasil sidang paripurna DPR RI, Komisi VI DPR RI hari ini menggelar rapat dengar pendapat perdana dengan Kementerian BUMN. Namun terdapat keanehan dalam rapat tersebut yang tidak dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno,” kata Andre saat dihubungi, Rabu (3/2).

Ketidakhadiran Rini ini dikarenakan yang bersangkutan masih dilarang oleh pimpinan

DPR. Utamanya berkaitan dengan rekomendasi Pansus Pelindo II yang disepakati melalui sidang paripurna, salah satunya merekomendasikan agar Presiden Jokowi memberhentikan Rini Soemarno.

“Ini menjadi PR bagi Presiden Jokowi tentang hubungan antara parlemen dengan pemerintah, karena hal tersebut bermula saat Komisi VI DPR RI yang dengan jelas menolak Rini Soemarno dalam kasus Pelindo II yang sudah direkomendasikan ke Presiden Jokowi,” jelas Andre.

“Presiden Jokowi harus dengan segera mencari solusi yang terbaik agar hubungan kerja DPR dengan pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur dan kecepatan pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan lancar,” lanjutnya.

Ditekankan Andre, partainya sebenarnya tidak ingin mencampuri masalah kewenangan Presiden, khususnya dalam merombak susunan kabinet. Akan tetapi, bagaimanapun rekomendasi Pansus Pelindo II yang disahkan melalui sidang paripurna akan menjadi duri dalam hubungan Presiden dengan DPR.

Sebab, DPR masih berharap rekomendasi tersebut harus tetap dilaksanakan Presiden. Akan tetapi, di sisi lain Presiden belum melaksanakan rekomendasi tersebut.

Karel Stefanus Ratulangji

## Langgar Kode Etik Banyu Biru Mundur Dari BIN

Anggota Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) Banyu Biru resmi mengundurkan diri dari jabatan. Demikian disampaikan oleh Kepala BIN Sutiyoso, di Istana Negara, Rabu (3/2).

“Pagi ini saya menerima pengunduran diri dia (Banyu Biru). Sudah resmi,” ujarnya.

Salah satu alasan mundurnya Banyu adalah terkait dengan tindakannya memposting Surat Keputusan pengangkatan dirinya di media sosial.

“Rasanya sudah merasa sudah tidak sesuai untuk tugas di situ. Dia mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan,” jelasnya.

Menurut Sutiyoso tindakan Banyu sudah melanggar kode etik anggota BIN. Pihaknya akan segera melakukan rekturmen untuk mengganti anak seniman Eros Djarot ini.

“Nanti kita akan rekrut kembali. Oh iya pasti itu memang dilarang dan itu baru pertama kali terjadi juga. Itu enggak terlalu merugikan negara, tetapi kan ini kode etik. Yang melanggar itu kode etik,” tegas Bang Yos. Wahyu Romadhoni

## Presiden Jokowi Akan Hadiri KTT ASEAN-AS

Presiden Joko Widodo akan menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN-AS di Amerika Serikat tanggal 16-16 Februari 2016.

“Jadi ini adalah ASEAN-US Summit karena tahun kemarin pada Oktober atau November 2015, kita, ASEAN dengan AS memiliki satu kemitraan yang baru yaitu ‘strategic partnership’,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di kompleks Istana Negara, Jakarta, Senin (1/2).

Menurut dia, dalam pertemuan tersebut juga akan diimplementasikan rencana aksi

dalam wadah kerja sama itu.

Menteri menjelaskan agenda pertemuan Presiden Jokowi di AS masih akan dikoordinasikan bersama menteri lain yang terkait agenda itu.

“Kami akan matangkan semua programnya,” kata Menlu.

Menurut data Sekretariat ASEAN, pada KTT ASEAN-AS 2015



di Malaysia diputuskan peningkatan dialog menjadi tingkat strategis.

Kemitraan strategis tersebut akan direalisasikan melalui implementasi rencana aksi kemitraan strategis ASEAN-AS pada 2016-2020.

Rencana aksi tersebut akan mendorong Masyarakat ASEAN pada tiga pilarnya erta lima kawasan prioritas seperti integrasi ekonomi, kerja sama maritim, tantangan antar-bangsa termasuk perubahan iklim, dan pendayagunaan perempuan dan anak.

Wahyu Romadhoni

## Jokowi dan Rini Soemarno Dinilai Keliru Memahami Pasal 33 UUD 45

Presiden Jokowi bersama Menteri BUMN Rini Soemarno dinilai salah menafsirkan Undang-undang, terkait pemanfaatan sumber daya.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, di Jakarta, Minggu (31/1).

“Kesalahan pertama adalah kekeliruan memahami makna pasal 33 yang diturunkan menjadi berbagai UU, termasuk di dalamnya UU BUMN,” kata Fahri.

Dijelaskan, BUMN bukanlah untuk berbisnis, melainkan menyalurkan kesejahteraan kepada rakyat. Hal ini berbeda dengan apa yang dikatakan Menteri Rini, bahwa proyek pembangunan kereta cepat murni untuk bisnis.

Pasal 33 ayat 2 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Pasal 33 ayat 3 berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

“Nah dalam hal ini apakah kerjasama 4 BUMN yang tergabung dalam satu konsorsium, 4 dengan perusahaan China dalam hubungan Bussines to Bussines jelas melanggar pasal tersebut. BUMN itu dibentuk dengan tugas utamanya menyebarkan kesejahteraan, menyalurkan kekayaan sehingga rakyat sejahtera,”

“Bisnis yang dilakukan BUMN hanya salah satu saja metodenya, selebihnya bisa dengan CSR, PKBL dan lain-lain. Itu tugas BUMN. Jadi bukan semata bisnis,” tambahnya.

Bahkan, perusahaan konstruksi milik Indonesia tak dimanfaatkan dalam proyek kereta cepat, malah memilih berhutang kepada China.

“Lah ini lahan PTPN diambil begitu saja, tidak dihitung, malah kita yang dibilang berutang pada mereka (China). Ini kan konyol. Ini cara berpikir yang keliru,” tegasnya.

*Karel Stefanus Ratulangi*

## Kaji Sistem Ketatanegaraan, MPR Mungkinkan Amandemen UUD 45

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Oesman Sapta Odang menegaskan MPR RI akan memaksimalkan Badan Pengkajian sistem ketatanegaraan untuk melakukan kajian atas sistem ketatanegaraan yang ada bagi kemungkinan adanya amandemen UUD 45.

“Tahun 2016 ini adalah tahun MPR untuk fokus menata kembali sistem ketatanegaraan,” kata Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta Odang pada rapat koordinasi Badan-badan Majelis Permusyawaratan Rakyat di Denpasar, Bali, Minggu (31/1).

MPR RI menggelar rapat koordinasi dengan badan-badan MPR selama dua hari untuk menetapkan program kerja prioritas tahun 2016. Rapat tersebut, membahas kejelasan

## Elektabilitas Meninggi, Panglima Gatot Jadi Pesaing Jokowi di Pilpres 2019

Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa menjadi saingan terberat Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilihan presiden 2019 mendatang. Mengingat elektabilitas Panglima saat ini meningkat menurut hasil survei Segitiga Institute.

Hasil jejak pendapat yang dilakukan lembaga survei Segitiga Institute mengungkapkan tingkat elektabilitas Gatot mencapai 35,9 persen. Apabila dibandingkan tiga mantan panglima sebelumnya, Gatot lebih unggul.

“22,6 persen responden memilih Moeldoko, 27,4 persen responden memilih Djoko Suyanto, sementara Agus Suhartono 14,1 persen,” ujar Direktur eksekutif Segitiga Institute Muhammad Sukron saat merilis hasil surveinya di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (30/1).

Sukron mengungkapkan, jika nama Gatot disanding dengan Jokowi, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tetap mendapat persentase pemilih lebih tinggi.

Dalam hal ini Jokowi tetap unggul

posisi MPR saat ini dalam menjawab ekspektasi masyarakat luas.

Lebih lanjut Oesman Sapta menjelaskan, bahwa fokus kajian tersebut merupakan hasil rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat 2009-2011, tentang penguatan MPR dan diberlakukannya kembali GHBN.

Lebih lanjut Oesman Sapta menjelaskan, MPR akan memaksimalkan badan pengkajian untuk melakukan kajian atas sistem ketatanegaraan, bagi kemungkinan adanya amandemen UUD 45 yang terbatas khusus penguatan lembaga MPR dan acuan pembangunan negara jangka pendek, menengah dan panjang, supaya tidak setiap ganti presiden ganti kebijakan.

“Ini sedang dalam proses, nanti kita lihat. Tetapi sekarang ini disadari semua pihak, harus ada program jangka pendek, menengah dan panjang,” kata Oesman Sapta. *Netby*

dengan posisi 59,3 persen, sementara Gatot berada di posisi 38,5 persen. Sedangkan responden yang tidak memilih hanya sebesar 2,2 persen

Meski demikian, Sukron menilai elektabilitas Gatot masih akan terus meningkat seiring waktu pelaksanaan Pilpres 2019.

“Angka ini sangat mengancam Jokowi, dengan jangka waktu sekitar tiga tahun lagi menjelang Pilpres, Gatot menjadi ancaman nyata bagi Jokowi,” imbuhnya.

Sukron menyatakan hasil survei tersebut dilakukan di 34 Provinsi di Indonesia pada 4 hingga 15 Januari 2016.

Populasi survei merupakan para penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih dengan jumlah sampel survei sebanyak 1225 responden yang diperoleh melalui teknik pengambilan sampel secara berjenjang atau multistage random sampling.

Tingkat kepercayaan survei sebesar 95 persen dengan margin of error kurang lebih 2,8 persen. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dengan pedoman kuesioner. *Arbie Marwan*



# Gejolak Harga Minyak dan Ancaman Global

**H**arga Minyak Mentah Dunia mengalami penurunan yang sangat signifikan dalam 1,5 tahun terakhir ini. Harga minyak berada di atas USD 100 per barel berdasarkan data bloomberg terakhir terjadi pada Juli 2014. Berharap kembali pulih, harga minyak justru malah semakin ambruk, 6 bulan kemudian harga minyak sudah berada di bawah USD 50 per barel. Ada harapan memang

ketika di bulan April-Juni 2015 harga minyak mencoba bangkit di kisaran USD 50 - USD 60 per barel, namun apalah daya pergerakan harga minyak justru semakin anjlok bahkan sampai di bawah USD 27 di awal tahun 2016.

Anjloknya harga minyak ini sudah barang tentu menjadi masalah besar bagi perusahaan minyak di seluruh dunia. Hampir semua perusahaan minyak melakukan efisiensi kegiatan di sektor hulu tak terkecuali di Indonesia, berdasarkan

keterangan SKK Migas, sekitar 80%-90% Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) melakukan efisiensi kegiatan hulu sampai 30%.

Salah satu penyebab anjloknya harga minyak dunia, selain diisukan tengah membanjirnya cadangan *shale oil* di Amerika Serikat, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga menahan laju produksinya. Berharap menurunkan produksi, OPEC di tahun 2015 malah memproyeksikan peningkatan jumlah



produksi minyak mereka.

“Meningkat pertumbuhan yang lebih baik dari perkiraan dalam permintaan minyak global sejauh tahun ini, bersama dengan beberapa tanda-tanda peningkatan dalam ekonomi negara-negara konsumen utama, permintaan minyak mentah dalam beberapa bulan mendatang akan terus meningkat, dan dengan demikian, secara bertahap mengurangi ketidakseimbangan dalam fundamental pasokan dan

permintaan minyak,” OPEC mencatat dalam laporan terbarunya, tengah tahun lalu.

Bahkan di penghujung tahun 2015, di saat harga minyak tengah hancur-hancurnya, OPEC malah mengumumkan produksi mereka semakin meningkat mencapai 31,7 juta barel. Direktur senior di IHS Energy, Jamie Webster mengatakan OPEC belum siap untuk menurunkan produksi minyaknya. Sementara itu, produksi minyak di Amerika

Serikat, pesaing kuat dari OPEC, bisa terus menurun pada 2016 mungkin menyebabkan harga minyak naik pada semester kedua.

#### **Kekhawatiran Dunia Akan Ancaman Ketahanan Energi**

Badan Energi International (IEA) mengatakan harga minyak yang terus rendah dalam periode panjang akan memicu kekhawatiran terhadap ketahanan energi suatu negara. Dalam laporan prospek energi



*Petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke truk tangki BBM di TBBM Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (7/1).*

dunia terbaru IEA mengatakan, jika harga minyak saat ini tetap selama beberapa dekade, maka ketergantungan pada minyak Timur Tengah akan kembali ke tingkat 1970-an, karena harga akan mendorong sumber-sumber pasokan berbiaya lebih tinggi. Selain itu harga yang rendah bisa melemahkan dukungan kebijakan penting untuk transisi energi, yang berarti 15 persen dari efisiensi penghematan hilang.

“Ini akan menjadi kesalahan besar untuk indeks perhatian kita terhadap ketahanan energi untuk perubahan harga minyak. Sekarang bukan waktunya untuk bersantai. Justru sebaliknya: sebuah periode harga minyak yang rendah adalah saat untuk memperkuat kapasitas kita menghadapi ancaman keamanan

energi masa depan,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol.

IEA memperkirakan tekanan pada harga minyak mentah akan berlanjut pada tahun ini, karena bertahannya kelebihan pasokan global sementara permintaan melemah. “Kita akan terus melihat tekanan turun pada harga minyak pada 2016 karena ada banyak minyak di pasar dan tidak begitu banyak permintaan,” kata Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol di Davos, beberapa hari lalu.

Permintaan semakin lemah karena perekonomian negara-negara besar melambat, Fatih mengatakan kepada kantor berita Xinhua dalam sebuah wawancara. “Kami akan melihat tekanan turun pada harga minyak pada tahun 2016, namun kita dapat melihat harga akan mulai meningkat pada akhir 2017,” kata Fatih. Harga minyak rendah adalah berita baik bagi beberapa negara yang merupakan importir minyak.

Tapi, itu merupakan berita buruk bagi eksportir minyak, negara-negara timur tengah khususnya dan Rusia.

#### **World Bank Juga Ikut Merespon**

Bank Dunia merespon dengan memangkas proyeksinya untuk harga minyak mentah 2016 dari USD 51 menjadi USD 37 per barel dan memperkirakan harga komoditas lainnya merosot lebih lanjut tahun ini, karena permintaan lemah dari negara-negara berkembang. World bank mengatakan hal ini terjadi karena kembalinya ekspor minyak Iran yang lebih cepat, ketahanan yang lebih besar dalam produksi AS dan prospek pertumbuhan lemah di negara-negara berkembang utama.

“Harga rendah untuk minyak dan komoditas cenderung bersama kami untuk beberapa waktu. Sementara kita melihat beberapa prospek untuk harga komoditas naik sedikit selama dua tahun ke depan, risiko



penurunan yang signifikan tetap ada,” kata John Baffes, ekonom senior dan penulis utama dari Prospek Pasar Komoditas.

### Bagaimana Nasib Indonesia?

Indonesia sudah menjadi negara net importir sejak tahun 2003. Turunnya harga minyak semestinya menjadi keuntungan bagi Indonesia, karena mendapatkan harga minyak yang murah. Namun karena Indonesia belum mempunyai kilang untuk menimbun sebagai cadangan penyangga, harga minyak yang rendah ini tidak bisa menjadi keuntungan. Malah pemerintah dan Pertamina tetap mempertahankan harga jual BBM, untuk menutupi kerugian di sektor hulu.

Sektor hulu sendiri yang menjadi seperempat penerimaan APBN, harga minyak yang rendah menyebabkan penerimaan negara menjadi berkurang. APBN dengan asumsi harga minyak USD 50 per barel pun terpaksa harus diubah, dengan menggenjot penerimaan pajak.

Pengamat Ketahanan Energi Lingkar Studi Strategis (Lingstra) Iqbal Nusantara, mengatakan jika harga minyak mentah dunia terus turun bahkan sampai menyentuh angka USD 20 per barel, maka ini akan mengancam kegiatan hulu migas Indonesia.

“Banyak sumur yang sudah beroperasi, maka KKKS akan menghentikan operasinya. Karena rata-rata biaya produksi minyak di Indonesia kan USD 20 per barel,” ujar Iqbal kepada aktual.com.

Lebih tragis lagi kata Iqbal, bahwa tidak ada KKKS yang akan melakukan eksplorasi jika harga minyak tidak mengalami pemulihan sampai USD 60 per barel. “Ya apalagi kegiatan eksplorasi, mencari cadangan sumur minyak baru itu kan butuh modal yang besar,” jelas Iqbal.

Ia meminta harus ada kebijakan strategis dari pemerintah jika tidak ingin Indonesia mengalami krisis darurat energi. “Indonesia masih bergantung sama minyak, fasilitas EBT masih belum memadai untuk

memenuhi kebutuhan energi,” pungkasnya.

Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik, Ichsanuddin Noorsy mengatakan merosotnya harga minyak dunia yang terus menerus akan berdampak pada penerimaan negara khususnya di sektor migas dan pajak migas.

“Fluktuatif dan menurunnya harga minyak dunia, tentu akan berdampak pada penerimaan negara. Sebagai contoh PPh Migas tidak akan tercapai, pada PNB minyak dan gas, juga pada persoalan PNB mineral dan batubara, karena harga batubara juga ikut ambruk. Dalam bahasa sederhana, target pendapatan APBN 2016 tidak akan tercapai di posisinya,” papar Noorsy kepada Aktual.com.

Noorsy mengungkapkan, kalau target pendapatan APBN 2016 tidak tercapai namun pemerintah tetap ingin mengejar pertumbuhan, maka jalan yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan surat utang. “Padahal beban utang kita sudah tinggi, dimana dari seluruh pendapatan PDB kita, 35 persen hanya dipakai untuk bayar utang. Ini tentu menjadi masalah buat bangsa ini,” ungkapnya.

Jika itu terjadi, tentu akan berdampak pada sektor lain misalnya kinerja pembangunan. Akan berat menurunkan angka pengangguran yang saat ini sudah mencapai 6 persen, berat akan menurunkan angka kemiskinan yang sudah 11,5 persen, dan berat menurunkan ketimpangan yang sudah 0,432 persen.

Di sisi lain, lanjut Noorsy, kita akan melihat bahwa orang kaya akan makin kaya. “Artinya saya ingin tegaskan bahwa dampak harga minyak ini akan melebar ke mana-mana,” lanjutnya.

Inflasi akan terjadi karena dorongan belanja. Kalau inflasi karena dorongan belanja itu artinya harga-harga akan ikut naik. Ini akan mempengaruhi kinerja pembangunan. “Yang terjadi adalah hanya akan terjadi pertumbuhan-pertumbuhan di kawasan tertentu, yang bersumber dari utang luar



negri pada basis infrastruktur,” beber Noorsy.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan penurunan harga minyak dunia akhir-akhir ini sudah pasti akan menurunkan pendapatan negara, khususnya dari sektor minyak dan gas bumi (migas).

“Pasti turun (penerimaan negara sektor migas), tetapi nanti kita berhitung dululah,” kata Bambang di Kantornya beberapa waktu lalu.

Untuk itu kata Bambang pemerintah berencana menurunkan asumsi harga minyak Indonesia (ICP) dari 50 dolar AS per barel menjadi 30-40 dolar AS per barel dalam Rancangan APBN Perubahan 2016. “Iya, kita lihatlah nanti apakah ke 30 atau 40 (dolar AS per barel),” terangnya.

Turunnya pendapatan negara tersebut juga bisa berdampak pada belanja pemerintah. Namun, Bambang masih enggan memastikan berapa penurunan postur fiskal akibat penurunan harga minyak dunia tersebut.

Adapun dalam asumsi makro APBN, penurunan harga minyak dunia akan berimbas pada perubahan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan lifting minyak dan gas (migas). Dalam APBN 2016, ICP diasumsikan sebesar 50 dolar AS per barel, sedangkan lifting migas 830 ribu barel per hari. ◦ Arbie Marwan



## Waspada! Anjloknya Harga Minyak Ancam Indonesia

**K**ening Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan RI itu, berkerut kala menjawab cecaran pertanyaan wartawan. Menteri yang biasanya bertutur tandas itu, tapi pada Selasa (12/1) lalu agak

terbata-bata menjawab dampak dari merosotnya harga si emas hitam ini. Terlebih anjloknya komoditas satu ini bakal berdampak besar pada penerimaan negara.

“Gara-gara minyak dunia anjlok, realisasi PNB (penerimaan negara bukan pajak) 2015 di sektor migas

turun,” keluh Menkeu, di kantornya, Selasa lalu.

Pemerintah tentu masih was-was. Sebab, penurunan minyak dunia di tahun ini bukannya mereda tapi kian menggila. Di akhir Januari ini saja, komoditas terpenting di dunia ini sudah menyentuh level di bawah



Belanja Negara (APBN) 2016 sebesar US\$ 50 per barel bakal bergeser jauh. Sehingga penerimaan pun kian anjlok.

Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyebutkan, realisasi harga minyak dalam APBN-Perubahan 2015 sebesar US\$ 50 per barel dari asumsinya US\$ 60 per barel. Akibatnya, realisasi PNBP hingga 31 Desember 2015 cuma Rp252,4 triliun atau 83% dari target Rp269,1 triliun. Sementara penerimaan sumber daya alam (SDA) sebesar Rp103,65 triliun, terendah sejak 2011.

Pun demikian data di Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu. Realisasi pajak penghasilan (PPh) migas juga anjlok drastis. Sampai 31 Desember 2015, realisasi penerimaan PPh migas tercatat Rp49,72 triliun. Jumlah itu merosot 43,14% dibandingkan realisasi periode sama tahun 2014 yang Rp87,45 triliun. Sehingga di APBN-P 2016 nanti, pemerintah hanya menargetkan PPh dari sektor migas dapat dikeruk mencapai Rp50,9 triliun. Serta PNBP sebesar Rp281,1 triliun.

Selain turunnya penerimaan negara, anjloknya harga minyak juga akan menyulut rontoknya harga komoditas yang lain, di antaranya batubara dan kelapa sawit. Sehingga, komoditas ekspor tersebut akan memantik kian terpuruknya laju ekspor di tahun 2016.

Itu dampak 'mengerikan' yang digambarkan pemerintah akibat anjloknya si emas hitam ini. Namun mestinya di sisi lain, sebagai negara konsumen minyak salah satu yang tertinggi di dunia, Indonesia pun - terutama para rakyatnya - mendulang untung juga dari terjun bebasnya harga komoditas ini.

#### **Harga Minyak Anjlok, Kok Harga BBM Subsidi Masih Mahal?**

Pemerintah, selaku pemegang amanah penentuan harga dari turunan produk minyak ini, seperti BBM jenis apa pun, selayaknya menyesuaikan harga di pasaran. Itu yang diinginkan rakyat. Tatkala

penurunan harga minyak dunia begitu masif terjadi setiap hari, seyogyanya direspon cepat pula oleh pemerintah dengan menurunkan harga BBM, bahkan bisa sesering mungkin.

Bagi publik, yang awam sekalipun, ketika setiap saat disodori berita anjloknya harga minyak dunia, mereka berpikir, mestinya berimplikasi pada penurunan harga BBM. Memang awal Januari ini, tepatnya tanggal 5, pemerintah menelurkan kebijakan penurunan BBM bersubsidi.

Penetapan penurunan harga BBM bersubsidi itu adalah, untuk solar turun dari Rp6.700 per liter menjadi Rp5.750 per liter. Sedangkan untuk jenis premium di wilayah Jawa-Madura-Bali (Jamali) turun dari Rp7.400 per liter ke Rp7.050 per liter. Dan premium non Jamali diturunkan menjadi Rp6.950 per liter dari sebelumnya Rp 7.300 per liter.

Akan tetapi itu tadi, jika dikomparasi dengan merosotnya minyak dunia yang terus menerus terjadi setiap hari, maka kebijakan tersebut dianggap kurang pas di mata rakyat. Bahkan bisa disebut, tidak pro rakyat!

Apalagi, kebijakan penurunan harga BBM bersubsidi lalu, tidak pula diimbangi dengan kebijakan penurunan harga barang-barang pangan di pasaran oleh kementerian terkait. Ini yang di kemudian hari sangat dikeluhkan rakyat.

Apalagi muncul fenomena baru, seiring anjloknya harga minyak dunia, untuk harga BBM jenis solar yang dijual perusahaan swasta untuk kalangan industri, ternyata lebih murah dari yang dijual di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik PT Pertamina (Persero). Wow, kok bisa?

Sebagai perusahaan yang berbisnis dalam skema B to B (business to business), tentu saja segala harga yang ditawarkan itu berdasar valuasi harga pasar. Ketika harga di pasaran sedang anjlok, maka secara otomatis komoditas solar yang dijualnya pun disesuaikan di harga

US\$ 30 per barrel. Penurunan terendah sejak 11 tahun ini dan terus mengalami penurunan selama 18 bulan ini pasca sebelumnya pernah bertengger di level US\$ 108 per barrel.

Para analis energi memproyeksikan harga komoditas cair ini masih bakal bergeliat landai hingga ujung tahun. Baru akan merangkak naik kemungkinan di awal 2017 nanti. Maka wajar Bambang merasa cemas. Harga minyak Indonesia (ICP) yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan dan



rendah. Tapi tidak yang dilakukan pemerintah.

Di saat harga minyak dunia sedang menukik tajam, pihak pemerintah tak bergeming untuk melakukan penurunan harga BBM bersubsidi. Mereka kerap beralih ada pola dan mekanismenya sendiri. Sikap pemerintah seperti ini yang disorot publik dianggap tidak peka dengan kondisi kehidupan rakyat yang sekarang serba susah ini. Padahal dengan harga pemerintah itu rakyat justru sudah mensubsidi negara!

“Pemerintah kurang peka dengan kondisi rakyat. Padahal minyak dunia yang terus anjlok, pemerintah cepat menyesuaikan,” kritik Komaidi Notonegoro, pengamat energi dari Reforminer Institute, baru-baru ini.

Memang, dalam hal ini, Pertamina tidak dapat berbuat banyak. Selama pemerintah tidak memutuskan penurunan harga solar bersubsidi, maka sepanjang itu pula harga solar subsidi tidak akan turun. Kendati, harga minyak dunia terus mengalir ke bawah.

“Akibatnya harga tidak akan turun sepanjang pemerintah belum menurunkan harganya,” ia menandaskan.

Dalam penentuan harga BBM bersubsidi ini, menurutnya, ada hitungan tersendiri berdasar alpha BBM yang disepakati antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat pembahasan APBN. Plus dikurangi biaya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 % dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) 5%. “Sehingga harga dinamisnya tergantung dari alpha per liternya itu berapa,” imbuh dia.

Pengamat hukum SDA dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi sependapat dengan Komaidi. Pemerintah dianggap salah dalam menetapkan harga BBM bersubsidi setiap tiga bulanan. Padahal penurunan harga minyak dunia begitu dinamis hampir setiap hari. “Kalau begitu, mana keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil?” katanya dengan nada bertany.



Seorang petugas mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ke dalam jerrigen di SPBN Jongor, Tegal, Jawa Tengah, Kamis (7/1).

Padahal, dengan harga minyak dunia saat ini, pemerintah malah kelihatan setengah hati dan ogah-ogahan dalam menurunkan kebijakan BBM bersubsidi. Mestinya, saran dia, dengan kondisi penurunan saat ini, pemerintah bisa konsisten menurunkan harga BBM bersubsidi bukan per tiga bulan, tapi bisa per bulan atau per dua pekan.

Berdasar hitung-hitungan Aktual.com, jika harga Means of Platts Singapore (MOPS) untuk jenis solar menyentuh harga US\$40 per barel, maka kalau dirupiahkan atau diliterkan, harga keekonomian solar berdasarkan MOPS adalah

Rp3.500/liter (belum termasuk biaya pengangkutan dan pajak).

Jika dihitung ongkos kirim, misalnya, US\$3 per barel (Rp300/liter) dan PPN 10% (Rp380/liter) ditambah PBBKB 5% (Rp190/liter), maka semestinya harga solar non subsidi di Indonesia berkisar di harga Rp4.370-Rp4.500 per liter. Tapi kenyataannya harga solar subsidi sampai saat ini Rp5.650 per liter (harga keekonomian: Rp6.750 per liter). Jadi ada selisih harga Rp2.380 dari harga keekonomian (selisih Rp1.280 dari harga subsidi).

### Dalih Pemerintah Soal Harga BBM Mahal

Namun sayangnya, pemerintah seolah tak mau bergeming dengan

memutuskan solar subsidi tetap di angka Rp5.650 per liter. Menurut Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Sudirman Said, ada tiga alasan dalam menurunkan harga BBM. Pertama, harga BBM ditinjau tiga bulan sekali. Review terakhir baru saja dilakukan pada awal bulan ini. Sehingga, perubahan harga BBM paling cepat ditetapkan pada April 2015.

Kedua, harga BBM ditetapkan tidak semata-mata berdasarkan harga minyak dunia. Ada faktor-faktor pembentuk harga lain seperti kurs rupiah, mata rantai pasokan, dan lain sebagainya. Ketiga, ia mencemaskan penurunan harga BBM bakal menjadi bumerang di kemudian hari. Pasalnya, penurunan harga BBM tak pernah diikuti oleh penurunan harga bahan pokok. Tapi sebaliknya, harga bahan pokok selalu naik ketika harga BBM naik.

Ia berdalih, jika penurunan BBM itu dilakukan terlalu dalam akan mengorbankan masyarakat kecil. Alasannya, harga bahan pokok tidak ikut menyesuaikan turun ketika harga BBM turun. "Ini dilema paling sulit. Karena kalau turun terlalu dalam, kasihan masyarakat bawah ketika nantinya terjadi kenaikan lagi," dalih menteri berprofesi akuntan ini dengan mimik meyakinkan di Komisi VII DPR, Senin (25/1) lalu.

Namun, langkah ini justru mencurigakan publik. Ada apa sebetulnya dengan pemerintah termasuk di bawahnya Pertamina ini? Sebab jika mereka bertahan menjual BBM di atas harga pasar, berarti ada keuntungan yang ditanggung mereka. Kalau benar begitu, tentu sangat menyedihkan.

"Jangan-jangan keuntungan itu hanya untuk dibagi-bagi kepada direksi dan pemegang saham Pertamina," tuding ekonom dari Indef, Enny Sri Hartati baru-baru ini.

Menurut Enny, masalah utama Pertamina selama ini adalah mereka tidak transparan ketika mendapat untung besar. Akan tetapi ketika ada kerugian, mereka langsung menginformasikan ke publik. Memang, perusahaan ini bukan

perusahaan terbuka, sehingga tidak ada kewajiban untuk melaporkan ke publik. Akan tetapi, karena Pertamina menjual produk untuk kebutuhan publik tentu harus dituntut transparan, apakah untung atau rugi.

"Jangan sampai untung Pertamina hanya untuk pihak tertentu saja. Dan jangan sampai mereka malah terbuka pas rugi atau untung kecil, tapi pas untung besar malah diam-diam saja," sindir dia.

Mestinya, dengan keuntungan yang besar itu, apalagi kondisi saat ini minyak dunia tengah anjlok, maka harus ada manfaat besar yang dinikmati oleh masyarakat. Caranya, Pertamina bisa memperbaiki kapasitas pelayanannya, juga dapat meningkatkan cadangan dana untuk membangun kilang baru, atau membangun energi terbarukan yang semua itu untuk keuntungan masyarakat.

### **Wow... Solar Industri Lebih Murah dari Solar Subsidi di SPBU!**

Fenomena solar industri yang dijual lebih murah dari yang dijual di SPBU milik Pertamina memang bukan isapan jempol semata. Seperti yang pernah terjadi pada bulan Agustus 2015 lalu yang saat itu harga solar subsidi di SPBU dijual dengan harga Rp6.900 per liter, salah satu perusahaan penjual solar non subsidi, PT AKR Corporindo Tbk, justru menjual solar industri di level Rp 6.400 per liter, lebih murah Rp500 per liter dari yang dijual SPBU Pertamina.

Direktur AKR Corporindo, Suresh Vembu saat dihubungi Aktual.com, Jumat (22/1) lalu menyebutkan, harga BBM jenis solar yang dijual pihaknya berdasarkan dengan harga pasar internasional. Artinya, jika harga pasar tengah dijual rendah, maka pihaknya sudah pasti menjual di harga yang murah pula.

"Harga solar yang kami jual sesuai dengan harga MOPS. Kalau harga minyak dunia turun kami akan sesuaikan, tapi ada formula tertentu untuk menghitungnya," tandas dia di ujung telepon.

Murahnya berapa, pihaknya

tidak bisa menyebutkan secara pasti. Sebab setiap perusahaan yang bernegosiasi dengan pihaknya harganya pasti berbeda. Semua itu tergantung negosiasi dengan pihak tertentu dan bersifat rahasia. Karena dimungkinkan harga yang disepakati antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya pasti berbeda.

Semuanya tergantung dengan volume penjualan dan lokasi perusahaan pembeli. Tak hanya itu, harga yang disepakati juga tergantung kurs valuta asing. Karena kami beli lewat dolar AS dan jual di Indonesia lewat rupiah,

"Penjualan kami itu murni B to B (business to business). Jadi sangat tergantung negosiasinya. Untuk satu industri dan lainnya akan berbeda," dia memaparkan.

Selama ini, emiten berkode AKRA itu menyuplai solar ke industri pembangkit, pertambangan, dan ritel seperti SPBU. "Data total penjualan di 2015 sendiri saat sedang kami hitung. Tapi data kuartal ketiga 2015 sebanyak untuk BBM solar perdagangannya mencapai Rp11,09 triliun dan distribusi sebanyak Rp13,54 triliun," jelas pria berdarah India ini.

Namun terkait harga MOPS, perubahan harganya itu setiap hari. Maka untuk menyesuikannya, pihak AKR melakukan perubahan yang dilakukan setiap dua pekan hingga satu bulan. "Biasanya kami sesuaikan harganya setiap 15 hari dan 30 hari. Itu harga fix kami," tegas Suresh.

Ketika ditanya apakah pembelian dalam jumlah volume besar bisa lebih murah lagi, bahkan jauh lebih murah dari SPBU Pertamina? Dia menyebutkan, semua tergantung mekanisme harga pasar dan ada varian-varian lain termasuk soal pajaknya.

Namun, lagi-lagi dirinya enggan menggunakan kata murah. Tapi lebih suka kata kompetitif. Karena dalam menghitung berapa harga yang pastinya, sangat terkait dengan biaya lain dalam perhitungannya. "Jadi, sangat bisa berubah juga tergantung biaya logistik," kata dia mengakhiri. ◦

Busthomi-Arbie Marwan



**H**arga minyak mentah dunia terus merosot, bahkan diperkirakan akan menembus level paling rendah 20 dollar AS per barrel. Kondisi ini jelas akan berdampak luas bagi Indonesia. Karena Indonesia adalah negara pengekspor minyak, ini akan berdampak pada penurunan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas. Penerimaan migas bagaimanapun masih merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara. Ini sisi negatifnya.

Apabila asumsi harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) merosot mengikuti harga minyak dunia, yang sekitar 28-29 dollar AS per barrel, akan terjadi penurunan penerimaan dari sektor minyak sebesar Rp 63 triliun. Jadi memang berpengaruh pada struktur APBN dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor migas, hingga Rp 35 triliun. Pajak minyak juga turun karena pendapatan kontraktor migas jeblok. Ini berdampak juga buat Pertamina dan perusahaan migas non-Pertamina.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) memastikan, penerimaan negara tahun 2016 bakal turun drastis akibat penurunan harga minyak dan rendahnya produksi. Bahkan, besaran biaya operasi yang dikembalikan (cost recovery) diprediksi lebih besar daripada penerimaan migas bagian negara.

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, penerimaan migas bagian negara diperkirakan antara 6,6-14,9 miliar dollar AS pada 2015. Hitungan tersebut didasarkan pada asumsi harga minyak 40-70 dollar AS per barrel, produksi minyak 849 ribu barrel per hari (bph) dan gas 1,177 juta bph, atau total produksi migas 2,026 juta bph. "Cost recovery diperkirakan 15,8-18,9 miliar dollar AS pada harga minyak yang sama," kata Amien, 19 Januari 2016.

#### Beban Subsidi BBM

Sebaliknya, karena Indonesia sudah



## Menjaga Keseimbangan di Tali Licin

Anjloknya harga minyak dunia menjadi berkah sekaligus ancaman pada ekonomi Indonesia. Pemerintah harus cerdas menyikapi turunnya harga minyak ini, jika tidak ingin terperosok.

menjadi net importir minyak dunia, harga minyak dunia yang menurun juga turut menurunkan kebutuhan valuta asing, yang akan digunakan untuk membeli minyak dunia. Subsidi bahan bakar minyak (BBM), yang selama sekian tahun ini membebani anggaran negara, juga akan jauh berkurang. Ini sisi positifnya.

Jadi, ada "berkah," tetapi sekaligus juga "ancaman" serius terhadap ekonomi Indonesia, akibat penurunan harga minyak dunia ini. Pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla dituntut untuk harus pintar menjaga keseimbangan yang rawan tersebut. Pemerintah seolah-olah harus berakrobat di atas tali licin, untuk terus melangkah maju sekaligus menghindarkan jangan sampai jatuh terjerembab.

Department Head bidang Industry and Regional Research Bank Mandiri, Dendi Ramdani, mengungkapkan, harga minyak dunia ke depan tidak

akan terperosok terlalu dalam. Permintaan minyak masih akan tinggi, terutama dari India yang merupakan importir minyak terbesar saat ini. "Kalau harga minyak terus turun, investasi oil and gas akan sulit. Dari sisi domestik, kalau (harga minyak) makin turun akan parah. Dampak jangka panjang, sulit untuk lifting minyak yang ditargetkan pemerintah," ujarnya.

Di sisi lain, pemerintah Jokowi-JK mendapat tekanan untuk menurunkan harga BBM di dalam negeri, sejalan dengan tren penurunan harga minyak dunia. Dengan penurunan harga minyak dunia yang begitu tajam, pemerintah seharusnya bisa mengkaji untuk menurunkan harga BBM. Kalau harga BBM diturunkan di awal tahun, inflasi terkendali, maka BI rate juga ada ruang untuk penurunan.

Menurut Direktur Pusat Studi Kebijakan Indonesia (Puskepi),



Sofyano Zakaria, turunnya harga minyak dunia bisa menjadi "ancaman" bagi perekonomian dan perusahaan minyak yang ada di Indonesia. "Turunnya harga minyak dunia pada dasarnya bukanlah berkah bagi bangsa ini, tetapi sekaligus (adalah) ancaman terhadap perekonomian negeri kita," kata Sofyano.

Sofyano khawatir, jika harga minyak terus turun di bawah harga pokok produksi, perusahaan minyak yang ada di Indonesia akan menghentikan produksinya. Ini akan berdampak pada semakin banyaknya PHK (pemutusan hubungan kerja). Harga pokok produksi minyak di Indonesia ada di kisaran 25 - 30 dollar AS/barrel, sehingga turunnya harga minyak dunia di bawah level itu menjadi ancaman bagi perusahaan minyak dalam negeri.

#### **Pemerintah dan Kontraktor**

Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengusulkan, sebaiknya pemerintah dan kontraktor berbagi beban atas dampak penurunan harga minyak. "Jadi *cost recovery*, misalnya, tidak dibayarkan sampai 63 persen, tetapi dibayar sebagian dan sisanya dibayarkan pada tahun berikutnya," tuturnya.

Kardaya juga mengungkapkan, harga gas untuk pasar domestik diharapkan bisa ditekan, menyusul

turunnya harga minyak dunia. Namun, upaya tersebut tetap harus memperhatikan besaran penerimaan dari sektor minyak dan gas bumi.

Penerimaan negara dari sektor migas harus diperhatikan lantaran menjadi modal dalam pembangunan negara. Namun, dengan harga gas domestik yang rendah, industri dan masyarakat akan memperoleh nilai tambah. "Kami berharap harga gas untuk dalam negeri bisa ditekan serendah mungkin agar *added value*-nya besar," katanya.

Deputi Pengendalian Hubungan Bisnis sekaligus Pelaksana Tugas Deputi Pengendalian Komersial SKK Migas Zikrullah menjelaskan, upaya untuk membuat harga gas domestik cukup rendah bisa saja dilakukan. Tetapi upaya ini tidak bisa dilakukan untuk kontrak gas yang telah berlangsung. "Yang ditekan harganya adalah yang untuk kontrak baru. Jadi nanti pengembangan lapangan dilakukan seefisien mungkin dan dipastikan tepat waktu," jelasnya.

Harga minyak diperkirakan akan terus turun. Apalagi Amerika sudah banjir dengan *shale oil*-nya dan juga *shale gas*. Biaya produksi *shale oil* Amerika sangat murah, yakni sekitar 5 - 10 dollar AS/barrel atau jauh lebih murah dari biaya produksi minyak fosil. Sedangkan negara-negara Arab penghasil minyak terbesar di dunia ini juga bersikeras tidak mau mengurangi produksinya.

Apalagi biaya pokok produksi mereka lebih murah ketimbang negara-negara lain, yaitu sekitar 5 - 10 dollar AS/barrel. Murahnya biaya *lifting* di negara-negara Arab itu disebabkan karena sumur-sumur minyak mereka penuh minyak. Hal itu jauh berbeda dibandingkan dengan sumur minyak di Indonesia, yang sudah nyaris "kering" sehingga perlu biaya tinggi untuk mengeluarkan minyaknya.

#### **Dana Stabilisasi BBM**

Sofyano tidak buru-buru mengusulkan agar harga jual BBM di dalam negeri diturunkan. "Pemerintah sebaiknya menyikapi secara cerdas turunnya harga minyak dunia, dengan menahan besaran

harga jual yang ada saat ini, dan mengelola keuntungan dari selisih harga tersebut, untuk dipergunakan sebagai dana cadangan untuk dana stabilisasi BBM, yang akan dipergunakan ketika harga minyak dunia naik kembali," ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah juga perlu menetapkan formula harga jual BBM dan menjelaskannya ke masyarakat, sehingga mereka paham berapa keuntungan dan kerugian yang dialami Pertamina, ketika harga minyak dunia turun dan ketika harga minyak dunia naik kembali.

Zikrullah mengungkapkan, sebagian besar lapangan dan sumur migas di Indonesia sudah cukup lama diproduksi (*mature*). Produksi migas nasional bakal babak belur jika begitu harga minyak turun, lapangan dengan biaya produksi di atas harga langsung dihentikan produksinya. Penghentian produksi merupakan opsi terakhir yang akan diambil pihaknya.

"Kan sumur migas kita sumur tua, begitu di *shut in* (*disetop produksi*), maka belum tentu bisa mengalir lagi seperti sebelumnya. Untuk gas justru lebih parah, kalau ditutup bisa jadi nanti tidak keluar (*produksi*) lagi," jelasnya.

Secara nasional, Zikrullah menyebutkan, rata-rata produksi migas nasional masih di kisaran 20 dollar AS per barrel. Namun biaya produksi beberapa lapangan migas lebih tinggi dari angka tersebut. Biaya produksi yang cukup besar utamanya untuk lapangan migas lepas pantai, yakni di kisaran 30 dollar AS per barrel.

Persoalan lain adalah bagaimana menjelaskan ini pada masyarakat. Pemerintah juga perlu menjelaskan ke publik apa dampak akibat melemahnya rupiah terhadap harga minyak dunia yang dominan diimpor, sehingga mereka bisa memahami atas sikap dan kebijakan pemerintah terhadap harga BBM. Besarnya keuntungan yang diperoleh pemerintah itu harus secara periodik dipublikasikan ke publik, termasuk juga ketika Pertamina mengalami kerugian akibat naiknya harga minyak dan semakin melemahnya rupiah. ◦ Satrio Arismunandar



Meyer Amschel Rothschild



## Menelisik Embrio Persekutuan Para Pedagang Uang AS-Inggris Mengatur Sistem Keuangan Global

Uang tidak punya asal-usul, pemodal adalah orang-orang tanpa patriotisme dan tanpa kesusilaan, satu-satunya tujuan utama mereka adalah keuntungan. (Napoleon Bonaparte, Kepala Negara Perancis, 1800)

**T**urunnya harga minyak dunia yang barang tentu berdampak pada Indonesia, sepertinya harus dijelaskan melalui rute yang lain. Percaya tidak percaya, arah kebijakan strategis perekonomian global memang hingga kini masih dikuasai segelintir orang yang tergabung dalam kartel milik

dinasti John D Rockefeller dan Rotschild.

Baru saja hari ini saya dengar kabar, ambruknya harga emas hitam di perdagangan dunia. Sementara saat yang sama, harga minyak di pasar Amerika Serikat saat ini menyentuh 27 dolar AS per barel. Jelas suatu penurunan drastis selama 12 tahun terakhir ini. Padahal,

pada pertengahan 2014 lalu, harga minyak masih di atas 100 dolar AS per barel. Sejak itu, harga minyak memang terjun bebas, bahkan sempat menyentuh 37 dolar AS per barel.

Di sinilah efek domino dari turunnya harga minyak dunia yang dibarengi dengan anjlognya harga emas hitam, sepertinya bergulir ke sektor-sektor strategis pelbagai negara. Baik negara produsen maupun konsumen minyak di pelbagai belahan dunia, mulai menerapkan kebijakan pengetatan anggaran, dengan segala





John D. Rockefeller

implikasinya. Bukan saja hasrat untuk meningkatkan produksi minyak berkurang atau bahkan berhenti, bahkan mulai diterapkan kebijakan mengurangi jumlah karyawan beberapa perusahaan minyak. Bisa dipastikan dampaknya tidak saja sebatas ekonomi, melainkan meluas ke sektor sosial-politik dan keamanan.

Ada satu isu strategis di balik gonjang-ganjing turunnya harga minyak dunia dan ambruknya harga emas hitam di perdagangan dunia. Yaitu betapa rawannya pertarungan adu kuat dan adu cerdas antara pemerintah dan pebisnis dalam mengendalikan peredaran uang.

Mari kita kilas balik sejenak cerita seputar Ratu Mary I, dari Kerajaan Inggris sekitar 1553. Selama masa pemerintahannya, Ratu Mary I menerapkan kebijakan memperketat sanksi hukum bagi

para pelaku usaha yang menerapkan hukum riba. Sontak hal ini bikin geram para pedagang uang. Maka mereka membalas dendam dengan cara memperketat jumlah uang yang beredar dengan menimbun koin emas dan perak, sehingga berakibat ekonomi Inggris menurun.

Pada 1558, Ratu Elizabeth I, saudara tiri Ratu Mary I jadi penerus untuk bertahta di Inggris. Menggantikan Ratu Mary I. Ratu Elizabeth I memutuskan untuk merebut kembali atas peredaran uang sehingga ia kemudian mengeluarkan koin emas dan perak sendiri. Seraya memberlakukan sistem ini melalui kas umum, sehingga kemudian berhasil mengambil kendali suplai uang dari para pedagang uang.

Masih cerita di kerajaan Inggris. Andrew Hitchcock, dalam bukunya bertajuk *History of Money*, punya versi sejarah yang mengejutkan

ihwal peran dari Oliver Cromwell. Dari sejarah yang kita baca selama ini, Cromwell digambarkan sebagai sosok perintis peralihan sistem kerajaan *absolute* menjadi Monarki Konstitusional di Inggris.

Namun menurut versi Hitchcock, apa yang terjadi pada 1642 tersebut justru berbeda 180 derajat. Gerakan Cromwell melawan kekuasaan Raja Charles I itu justru didukung secara diam-diam oleh para pedagang uang. Mereka memberi bantuan dana kepada Cromwell untuk melancarkan apa yang kelak dikenal sebagai Revolusi di Inggris mengubah kerajaan *absolute* menjadi Monarki Konstitusional, di mana yang berkuasa menjalankan roda pemerintahan adalah Perdana Menteri dengan dikawal oleh Parlemen.

Namun agenda sesungguhnya dari gerakan Cromwell adalah agar para pedagang uang Inggris bisa memegang kembali kendali atas suplai uang. Agaknya konspirasi mereka berhasil, ketika akhirnya Cromwell berhasil menggulingkan Raja Charles I, yang kemudian disusul vonis hukuman mati bagi Raja Charles I pada 1649.

Alhasil, sejak era itu, Inggris praktis dikuasai oleh kartel pedagang uang yang berhasil mengkonsolidasikan kekuatan mereka selama beberapa dekade kemudian, bahkan hingga kini.

Namun, jalan cerita belum berhenti sampai di situ. Pada 1688, para pedagang uang di Inggris mengalami benturan kepentingan dengan Dinasti Stuart, khususnya dengan Raja Charles II (1660-1685), maupun dengan Raja James I (1685-1688), sehingga para pedagang uang Inggris itu sepakat bersekongkol dengan jaringan mereka di Belanda, yang sudah jauh lebih berhasil mengkonsolidasikan kekuatannya, dengan mendirikan Bank Sentral Belanda.

Maka, para pedagang uang Inggris justru memberi bantuan dana kepada Raja William Orange dari Belanda untuk melakukan invasi



ke Inggris. Persekongkolan mereka berhasil. William of Orange naik tahta di Inggris dengan menyandang gelar Raja William III pada 1689. Maka, berakhirlah dinasti Stuart di Inggris. Sejak saat itu, para pejabat pemerintah Inggris tunduk dan patuh pada arahan para pedagang uang. Salah satu bentuk keberhasilan para pedagang uang menyetir pemerintah Inggris, yaitu dengan diizinkan pihak pengusaha swasta untuk mendirikan Bank Swasta sehingga diizinkan mencetak uang. Dengan begitu, cikal bakal liberalisme ekonomi mulai ditanamkan akar-akarnya di Inggris.

Melalui Bank of England, para pedagang uang Inggris ini berhasil membodohi masyarakat agar percaya bahwa bank tersebut merupakan milik pemerintah, padahal milik kekuatan-kekuatan modal swasta tersebut.

Selama 4 tahun pertama Bank of England, rencana mereka untuk mengendalikan suplai uang berkembang pesat. Utang awal yang sebelumnya hanya 1,25 juta pound kemudian bertambah menjadi 16 juta pound. Jelas ini merupakan peningkatan sebesar 128% hanya dalam kisaran 4 tahun.

Siasat licik para kapitalis keuangan ini mulai kelihatan. Bila uang yang beredar di sebuah negara adalah 5 juta pound, dan Bank Sentral kemudian menerbitkan 15 juta pound baru dan mengedarkannya di masyarakat dalam bentuk pinjaman, maka ini akan melemahkan nilai dari 5 juta pound yang sebelumnya ada.

Sebanyak 5 juta pound itu sekarang nilainya hanya 25 persen dari perekonomian. Dengan begitu, bank mengontrol yang 75 persen dari sirkulasi uang di negara tersebut. Inilah tahapan pertama dari skema kerja para kapitalis global itu.

Melalui skema ini, kemudian terjadilah inflasi sehingga berakibat pengurangan nilai uang yang dimiliki setiap orang karena masyarakat tersebut dibanjiri dengan uang baru dari Bank Sentral. Karena nilai uang

bertambah kecil, orang-orang mulai pergi ke bank untuk mengajukan pinjaman modal demi menjalankan usaha dan lain sebagainya.

Ketika bank sentral merasa cukup puas dengan tingkat utang yang meningkat dari masyarakat tersebut, maka mereka mulai melakukan kebijakan pengetatan suplai uang, dengan cara mempersulit pinjaman. Maka, inilah tahap kedua dari skema kerja mereka.

Tahap ketiga, sudah bisa kita tebak. Mereka cukup hanya duduk manis menunggu sebagian debitur gagal bayar atau bangkrut, sehingga memberikan kesempatan kepada bank untuk menyita kekayaan riil, bisnis, properti dan lain sebagainya. Dengan cara, membayar harga murah kepada pemilik sebelumnya. Sekadar informasi, yang namanya inflasi itu sama sekali tidak memberikan efek buruk kepada bank. Sebaliknya justru meraup keuntungan dan manfaat dari krisis tersebut. Sebab begitu mereka kekurangan uang, mereka tinggal mencetak uang lagi.

Salah satu aktor kunci dari pedagang uang Inggris yang kelak merupakan konglomerat berskala global adalah, Mayer Amschel Bauer, yang kemudian ganti nama jadi Mayer Amschel Rothschild.

Di Amerika Serikat, pengagasan untuk membuka sebuah bank swasta, adalah Robert Morris, Kepala Pengawas Keuangan, yang tujuan awalnya adalah mengatasi masalah kekurangan uang. Ketika masih jadi daerah jajahan Inggris, Amerika dilarang untuk mengeluarkan uang mereka sendiri sejak 1764. Benyamin Franklin, salah satu pencetus Revolusi Kemerdekaan Amerika, Amerika sebagai daerah jajahan Inggris bisa makmur karena menerapkan Colonial Scrip, hak untuk menerbitkan mata uangnya sendiri sesuai proporsi permintaan dari perdagangan dan industri yang memproduksi semua barang dari produsen ke konsumen.

“Dengan mengendalikan mata uang kami sendiri, kami mengendalikan daya beli mata uang

kami, dan kami tidak berutang kepada siapapun.” Begitu Inggris tahu itu, parlemen Inggris kontan mengeluarkan Currency Act pada 1764, melarang koloni mereka itu mengeluarkan mata uang mereka sendiri. Dan semua pajak diharuskan dibayarkan dalam bentuk koin emas maupun perak. Maka sejak itu, Amerika yang semula makmur, tiba-tiba dilanda depresi ekonomi maupun meningkatnya jumlah pengangguran rakyat Amerika.

Namun di situ pula sialnya Inggris. Hilangnya hak koloni untruk mengeluarkan mata uang mereka sendiri dari tangan Raja George III dan para bankir internasional, pada gilirannya telah memicu pemberontakan warga Amerika melawan negara induknya, Inggris. Dan mereka berhasil memerdekakan Amerika pada 1776, di bawah pimpinan George Washington.

Pada 1781, seiring berakhirnya Revolusi Kemerdekaan Amerika, Kongres Amerika mengizinkan Robert Morris, membuka sebuah bank swasta, untuk mengatasi masalah kekurangan uang gara-gara Currency Act Inggris pada 1764 itu.

Maka berdirilah Bank Sentral pertama Amerika dengan nama, Bank of North America, yang dioperasikan dengan cara yang serupa dengan Bank of England. Dalam arti, mereka bisa menerapkan Fractional Reserve Banking, yaitu menciptakan uang yang tidak mereka miliki, meminjamkannya kepada orang lain dengan mengenakan bunga atas pinjamannya.

Sialnya bagi rakyat Amerika, Morris nampaknya berbakat mewarisi kebusukan para pedagang uang Inggris maupun para bankir Bank of England. Piagama bank menyerukan investor swasta untuk memberikan modal awal sebesar 400.000 dolar AS, namun tidak mampu dipenuhi oleh Morris.

Maka otak kriminal Morris mulai main. Melalui pengaruh politiknya, ia mendapatkan emas yang disimpan di Bank Sentral, emas yang dipinjamkan ke Amerika oleh Perancis. Morris



kemudian meminjam uang yang ia butuhkan untuk membeli bank ini dari deposit emas milik pemerintah atau lebih tepatnya masyarakat Amerika.

Inilah awal penipuan Bank of North America. Sehingga masyarakat umum percaya bahwa bank itu yang seakan-akan berada dalam kendali pemerintah, dapat diberi hak memonopoli keuangan nasional. Dari cerita ini saja, nampak jelas watak kapitalistik Amerika yang melalui pengendalian terhadap sistem keuangan negara, praktis para kapitalis global Amerika lah yang mengendalikan pemerintahan di Gedung Putih maupun Kongres di Capitol Hill.

Begitupun, sejauh menyangkut ambisi Morris, pada 1785 akhirnya dihentikan oleh Kongres Amerika, karena dinilai gagal memecahkan masalah pasokan uang, sehingga ekonomi nasional tetap menurun. Alhasil, piagam bank Bank of North America tidak diperpanjang lagi.

Namun persekongkolan Robert Morris, Alexander Hamilton, Thomas Willing, nampaknya terus berlanjut, untuk membuka pintu lebar-lebar bagi para kapitalis dan pedagang uang Amerika untuk menguasai

sistem keuangan, dan bahkan perpolitikan Amerika. Salah satu agenda mereka, adalah mendesak para delegasi Konvensi Konstitusi, agar Kongres tidak diberi kekuasaan untuk mencetak uang. Mereka lupa atau pura-pura lupa, bahwa skema Colonial Scrip semasa masih dijajah Inggris itulah, yang membuat Amerika makmur.

Akhirnya, konspirasi Alexander Hamilton, Robert Morris dan Thomas Willing itu, berhasil. Pada 1790, Hamilton mengusulkan ke Kongres untuk membuat Bank Sentral swasta baru. Bank baru itu bernama First Bank of United States, yang sama persis dengan Bank of North America. Kebetulan ketiganya merupakan para pemegang otoritas moneter. Hamilton ketika itu, Menteri Keuangan. Thomas Willing, kemudian ditunjuk sebagai Presiden bank sentral swasta yang baru itu. Meski di belakang layar, Morris tetap sebagai penguasa sesungguhnya.

Bank tersebut diberi hak monopoli mencetak uang Amerika Serikat meskipun 80 persen dari saham bank itu dipegang oleh investor swasta, sedangkan 20 persen lainnya dibeli oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun pemerintah

sama sekali tidak mengendalikan bank tersebut.

Seperti halnya Bank of England maupun Bank of North America, investor swasta tidak pernah membayar penuh jumlah yang disepakati untuk saham mereka. Yang terjadi sesungguhnya adalah, melalui sistem penipuan cadangan Fractional perbankan, saham pemerintah yang berjumlah 20 persen senilai 2 juta dolar AS dalam bentuk tunai, digunakan untuk memberi pinjaman kepada investor swasta untuk membeli 80 persen saham lainnya, atau senilai 8 ribu pound. Sehingga jadi investasi bebas resiko.

Berarti, First Bank of United States hanya berubah nama belaka, yang tujuannya adalah untuk menyembunyikan kenyataan dari masyarakat bahwa bank tersebut adalah milik pribadi. Banyak yang percaya, Rothschild berada di balik berdirinya bank ini.

Menariknya, ketika Hamilton pada 1790 mengusulkan bank ini kepada Kongres, Mayer Amschel Rotschild membuat pernyataan dari banknya di Jerman: “Biarkan aku mengeluarkan dan mengendalikan uang suatu negara dan aku tidak peduli siapapun yang menulis hukumnya.”

Namun bank sentral sebagai skema para pemodal dan pedagang uang ini, nampaknya mendapat perlawanan dari Napoleon Bonaparte pada 1800. Ketika Bank of France dengan meniru model First Bank of United States dan Bank of England, Napoleon kontan menyatakan ketidakpercayaannya pada bank ini. Menurut Napoleon, ketika para bankir untuk urusan uang, maka para bankir, bukan pemerintah yang akan memegang kendali.

Tak heran jika para bankir dan pemodal bertekad untuk menyingkirkan Napoleon, sehingga bersedia membiayai setiap negara yang setuju untuk menggusur Napoleon. Serangan angkatan laut Inggris yang dipimpin Wellington, akhirnya memaksa Napoleon turun tahta dan kemudian Louis XVIII



dinobatkan jadi raja Perancis. Adapun Napoleon, diasingkan ke pulau Elba, di lepas pantai Italia.

Namun Napoleon ternyata masih punya Kharisma kepemimpinan, dan berhasil melarikan diri dari Elba, dan merebut kembali kekuasaan pemerintahan Perancis. Dan menyatukan kembali tentaranya. Namun lagi-lagi, Duke of Wellington, berhasil mengalahkan Napoleon dalam Perang 90 hari di Waterloo.

Sepertinya, tergusurnya Napoleon tak lepas dari peran sentral Nathan Rothschild. Bahkan Nathan Rothschild sempat-empatnya memanipulasi berita-Perang Waterloo, yang mana ia menebar berita seakan-akan Napoleon berhasil memenangi peperangan di Waterloo, sehingga terjadi kepanikan di pasar modal, sehingga pelaku usaha beramai-ramai menjual sahamnya. Dan harga saham anjlog.

Padahal, dari awal Nathan Rothschild sudah tahu bahwa perang Waterloo berhasil dimenangkan Inggris, dan Napoleon kalah. Maka ketika harga saham anjlog, karena semua orang menjual surat utang mereka (obligasi Pemerintah Inggris), namun Rothschild secara diam-diam mulai membeli semuanya melalui agen-agennya, tentunya dengan harga murah, dibandingkan dengan harga surat-surat itu beberapa jam sebelumnya.

Banyak surat utang itu mampu dikonversi dengan saham Bank of England. Melalui cara itulah, Rothschild mengambil-alih kendali Bank of England dan peredaran uang di Inggris sejak saat itu.

### Cikal Bakal Berdirinya The Federal Reserve


Lagi-lagi ulah para pedagang uang. Pada 1900-an para pedagang uang ini bermaksud mendorong bisnis mereka dengan mendirikan Bank Sentral yang dimiliki swasta, di Amerika. Rothschild, Jacob Schiff, Khun Loeb and Co, dalam sebuah pidato di New York Chamber of Commerce melontar ancaman:

“Kecuali kita memiliki Bank

DECEMBER 24, 1913-SIXTEEN PAGES. PRICE TWO CENTS.

# PRESIDENT'S SIGNATURE ENACTS CURRENCY LAW

## Wilson Declares It the First of Series of Constructive Acts to Aid Business.



PRESIDENT WOODROW WILSON.

### WILSON SEES DAWN OF NEW ERA IN BUSINESS

aims to Make Prosperity Free to Have Unimpeded Momentum.

### HOME VIEWS OF CURRENCY ACT

"A Christmas present to the people of the country," is the name Gov-Elect David I. Walsh gives to the Currency act. "I think," he said last night, "that President Wilson and the National Congress are to be congratulated upon the enactment of the Currency bill.

### FOUR PENS USED BY PRESIDENT

WASHINGTON, Dec 23—President Wilson signed the Glass-Owen Currency Bill at 6:01 o'clock tonight in the presence of members of his Cabinet, the Congressional Committee on Banking and Currency and Democratic leaders in Congress generally. With a few strokes of the pen, the President converted into law the

### Makes Speech to Group of Democratic Leaders.

### Conference Report Adopted in Senate by Vote of 43 to 25.

### Banks All Over the Country Hasten to Enter Federal Reserve System.

### Gov-Elect Walsh Calls Passage of Bill A Fine Christmas Present.

Sentral dengan kontrol yang memadai untuk mengatur kredit, negara ini akan mengalami kepanikan dan kondisi keuangan paling parah dalam sejarah.”

Maka, untuk menjalankan skema Rothschild, diterjunkanlah JP Morgan, sebagai utusan Rothschild di garis depan, untuk mewujudkan agenda pembentukan bank sentral swasta AS itu.

Adalah JP Morgan ini, yang merupakan kaki-tangan Rothschild untuk menghancurkan

keuangan global, terutama dengan menjatuhkan pasar saham. Misalnya ketika Morgan Cs sadar bahwa ribuan bank-bank kecil berkembang begitu cepatnya, dan beberapa bank hanya memiliki cadangan kurang dari 1% yang berarti di bawah prinsip cadangan bank, Dalam beberapa hari, penarikan uang secara besar-besaran terjadi di penjuru negeri. Sehingga bank-bank itu jadi kolaps.

Begitu bank-bank itu kolaps, Morgan mulai dengan otak kriminalnya. Ia melangkah dan

mengumumkan akan membantu bank-bank yang kolaps itu. Agenda tersembunyi yang dia tak nyatakan adalah, ia akan melakukan hal itu dengan mencetak uang tanpa modal apapun. Lantas, yang terjadi kemudian adalah kejutan besar. Morgan kemudian menetak uang dari pihak swasta sebesar 2 juta dolar AS tanpa cadangan sama sekali.

Hasilnya, kepercayaan masyarakat umum terhadap uang memang pulih kembali. Tetapi, yang paling penting adalah, kekuatan perbankan sekarang telah dikonsolidasikan ke tangan beberapa bank besar. Dan itu artinya, peran sentral JP Morgan dalam mengatur skenario para pemodal berskala global tersebut. Termasuk dalam menggolkan berdirinya Bank Sentral The Federal Reserve.

Pada November 1912, ketika Woodrow Wilson terpilih sebagai Presiden AS, JP Morgan beserta Paul Warburg, Bernard Baruch dan lain-lain, mengajukan Rancang Undang-Undang baru yang disebut Warburg sebagai Federal Reserve System. Beberapa kalangan, seperti Senator Charles A Lindberg Sr, menyatakan:

“Undang-Undang ini jadi undang-undang besar di bumi. Ketika Presiden menandatangani RUU ini, maka pemerintahan tak terlihat dari kekuatan modal telah disahkan. Orang-orang mungkin tidak mengetahuinya dengan serta merta, tapi hari ketika masyarakat sadar hanya tinggal menunggu waktu.... Kejahatan legislatif terburuk pada dunia perbankan dan mata uang telah dilakukan oleh undang-undang ini.”

Sekarang, ketika Federal Reserve sudah jadi kenyataan, terungkap bahwa pemilik Federal Reservece antara lain:

**Rothschild**, Bank of London.

**Warburg**, Bank of Hamburg, Jerman.

**Rothschild**, Bank of Berlin.

**Lehman Brothers** of New York.

**Lazard Brothers** of Paris.

**Kuhn Loeb**, Bank of New York

**Israel Moses Seif**, Bank of Italy

**Goldman Sachs**, of New York.

**Warburg**, Bank of Amsterdam  
**Chase of Manhattan**, Bank of New York.

Federal Reserve sebagai Bank Sentral AS yang seakan-akan milik pemerintah dan masyarakat umum AS itu, sejatinya merupakan sistem moneter melalui sektor perbankan untuk melayani kepentingan pemodal. Hal ini bisa terbaca melalui bebrapa kesepakatan yang mereka buat sendiri ketika bertemu secara diam-diam di Jekky Island:

1. Sistem ini mencegah setiap upaya reformasi perbankan di masa depan, karena Federal Reserve merupakan satu-satunya produsen uang.
2. Sistem ini pada gilirannya akan mencegah sistem keuangan pemerintah yang bebas utang, seperti Greenback-nya Presiden Abraham Lincoln, muncul kembali. Sebaliknya, sistem berbasis obligasi keuangan pemerintah, dipaksakan pada masa Lincoln setelah ia menciptakan Greenbacks. Dengan adanya Federal Reserve, gagasan semacam itu tinggal kenangan.
3. Sistem ini seakan mendelegasikan kepada para bankir, hak untuk menciptakan 90 persen pasokan uang masyarakat didasarkan pada sistem palsu cadangan perbankan dan memungkinkan mereka memberikan pinjaman dari 90 persen pasokan uang dengan mengenakan bunga.
4. Sistem ini memberikan kontrol pusat terhadap keseluruhan pasokan uang negara di satu tangan dan menguntungkan beberapa orang saja.
5. Sistem ini membangun Bank Sentral milik swasta dengan tingkat kemandirian yang tinggi dari kontrol politik.

Bahkan bukan itu saja.

Kekuatan kapitalisme keuangan tela menciptakan sistem kontrol dunia keuangan yang berada dalam genggaman swasta sehingga mampu mendominasi sistem politik masing-masing negara dan ekonomi dunia secara keseluruhan.

Federal Reserve, pada perkembangannya bukan sekadar Bank Sentral AS, melainkan telah menjadi Bank Sentral Dunia sebagai pengatur tata kelola perekonomian dunia, yang didasarkan pada perjanjian rahasia untuk melakukan pertemuan dan konferensi yang seringkali diadakan secara rahasia pula.

Inilah hakikinya masalah di balik turunnya harga minyak dunia maupun anjlognya harga emas hitam di perdagangan dunia.

Kenyataan bahwa para pengendali politik minyak sejagad dikendalikan oleh ExxonMobil, Royal Dutch Shell, Socal(Chevron), Gulf, Texaco, Connoco Phillips, dan British Petroleum, yang hakikinya adalah milik Dinasti John D Rockefeller dan Rothschild, bisa dijelaskan temalnya melalui awal tulisan saya tadi.

Mereka inilah yang kelak populer dengan sebutan the Seven Sisters alias Tujuh Bersaudari. Merekalah yang pegang kendali atas politik minyak sejagad, keseimbangan kekuasaan antara negara-negara produsen dan negara-negara konsumen minyak. Ketujuh korporasi minyak inilah yang kemudian membagi-bagi monopoli minyak dunia antar mereka, melalui berbagai kesepakatan rahasia di antara mereka. Yang mulanya, orang menyangka di antara korporasi-korporasi tersebut terlibat dalam persaingan yang cukup sengit merebut konsesi minyak di pelbagai belahan dunia, sehingga mereka terpaksa bergabung dan merger sebagai sebuah kartel yang menguasai monopoli jual-beli minyak.

Tapi seperti sebuah ungkapan, “Orang-orang minyak itu seperti kucing, kita tidak pernah bisa tahu dari suara mereka apakah mereka sedang berkelahi atau bercinta.” ◦

Hendrajit



Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Negara Iriana Widodo (ketiga kanan), Menko Perekonomian Darmin Nasution (kedua kanan), Menteri BUMN Rini Soemarno (kanan), Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil (keempat kanan), State Councilor of the Peoples Republic of China Wang Yong (kiri), Presiden of China Railway Corp Sheng Guangzu (keempat kiri), mendengarkan penjelasan dari Direktur Utama PT KCIC Hanggoro Budi Wiryawan (ketiga kiri) saat 'groundbreaking' pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Cikalong Wetan, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (21/1).

## Lanjutkan Kereta Cepat, Ini Koneksi yang harus Dipenuhi Menteri Rini

Proses pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung dengan jarak 142 Km yang menelan biaya USD5,5 miliar terancam "mangkrak" atau terbengkalai. Pasalnya Kementerian Perhubungan menolak memberikan izin usaha jika PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku badan usaha penyelenggara kereta api cepat tidak memenuhi syarat konsesi.

Direktur Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, Hermanto Dwiatmoko mengatakan bahwa tidak ada negosiasi dalam konsesi, poin yang tercantum dalam konsensi bersifat final.

"Ini persyaratan, tidak ada negosiasi, kalau mereka mau, ya penuhi persyaratan, tidak akan ada perubahan dalam konsesi ini," kata Hermanto Dwiatmoko di kantor Kementerian Perhubungan, Rabu, (3/2)

Adapun isi konsesi tersebut sebagai berikut;

1. Masa konsesi 50 tahun, berlaku sejak ditandatanganinya perjanjian konsesi dan tidak dapat diperpanjang.
2. Tidak ada fee konsesi
3. Tidak menggunakan dana APBN,
4. PT.KCIC harus tunduk pada

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Setelah masa konsesi berakhir, prasarana diserahkan dalam kondisi Clean and Clear (tidak dijamin pada pihak lain) dan dalam kondisi layak operasi.
6. Perjanjian konsesi tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah apabila dikemudian hari ada perubahan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintah tidak akan memberikan izin kereta api cepat lainnya dalam jarak lintas dimana stasiun pemberhentiannya Berjarak kurang dari 10 km dari PT. KCIC.
8. Pemerintah dapat memberikan izin operasi sarana kereta cepat lainnya pada koridor prasarana PT.KCIC setelah mendapat persetujuan PT.KCIC.
9. Pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta api cepat yang disebabkan oleh PT.KCIC. "Jadi, jaminan yang diminta

PT.KCIC bukan jaminan finansial tapi lebih ke jaminan kepastian hukum, janga karena ada aturan baru lalu tiba-tiba dicabut, kalau proyek gagal, itu mereka tanggung sediri," tutur Hermanto. *Ismed Eka*

## Jokowi Ngotot Teruskan Kereta Cepat, DPR Akan Bentuk Pansus

Ketua Komisi VI DPR RI, Ahmad Hafisz Tohir mengungkapkan, kemungkinan penggunaan hak angket untuk mempertanyakan kepada Presiden Jokowi terkait mega proyek Kereta Api Cepat (KAC) Jakarta-Bandung bisa saja dilakukan dengan membentuk pansus kereta api cepat.

"Jika Presiden Jokowi tetap ngotot ingin melanjutkan proyek kereta cepat ini, tanpa melakukan kajian komprehensif terlebih dahulu, apalagi melihat banyaknya penolakan dan gugatan dari berbagai kalangan masyarakat, kita tentu akan lakukan hak angket dengan membentuk pansus," ucap Hafisz Tohir di Gedung Nusantara DPR RI, Selasa (2/2).

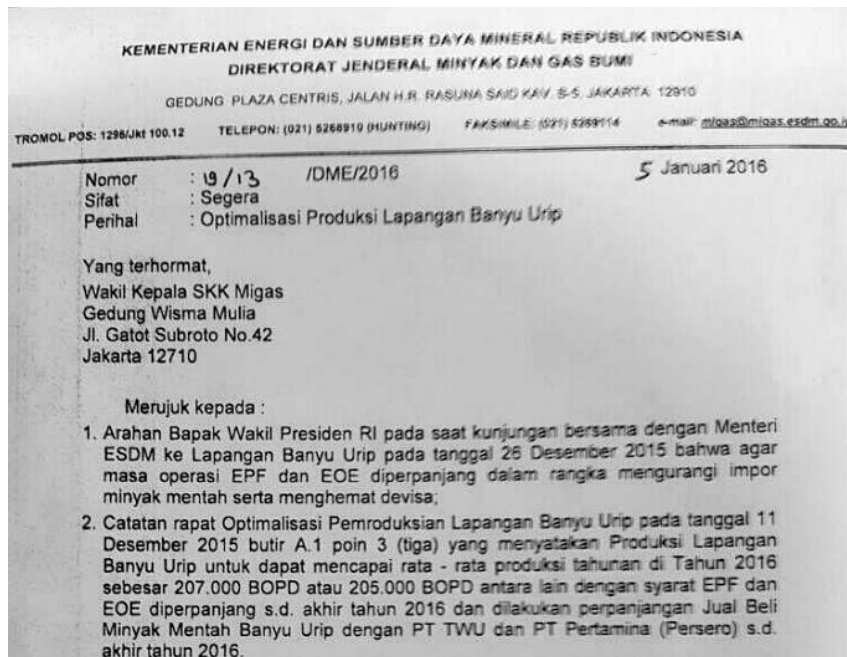
Hafisz menyebut, jika proyek ini sangat aneh bin ajaib. Pasalnya, rencana tersebut sampai saat ini belum pernah dibahas dan dibicarakan oleh pemerintah bersama Komisi VI DPR RI. Padahal resiko pengerjaan proyek ini sangat besar, melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sementara Komisi VI yang merupakan alat kelengkapan DPR yang membidangi industri, perdagangan, BUMN, investasi dan persaingan usaha tidak pernah membicarakannya.

"Jadi dalam hal ini, keterlibatan 4 BUMN tersebut dalam pengerjaan proyek KAC, maka selayaknya kementerian yang menangani 4 BUMN tersebut membicarakan dahulu dengan komisi VI. Sampai saat ini kementerian BUMN belum pernah membicarakannya," beber Hafisz

Padahal, dengan keterlibatan BUMN sebagai pelaksana dalam proyek ini menggunakan aset negara, maka BUMN tersebut tentunya harus mendapatkan izin dari Komisi VI terlebih dahulu dalam pembangunan proyek KAC ini. Selain itu, rencana pembangunan kereta cepat tersebut belum layak dan terkesan dipaksakan.

"Apalagi, seperti diketahui bahwa pembangunan KAC ini belum mengantongi rekomendasi dari Menteri Perhubungan," ungkapnya. *Ismed Eka*

## Perpanjang Kontrak EOE dan EPF, SKK Migas: Arahan Wapres JK Merugikan Negara



Arahan Wapres JK yang tertuang dalam surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Nomor 19/13/DME/2016 tertanggal 5 Januari 2016 untuk optimalisasi produksi minyak lapangan banyu urip di Blok Cepu, diperkirakan akan membawa kerugian bagi negara.

SKK Migas merasa keberatan karena dianggap tidak sesuai perhitungan dan akan merugikan negara.

Kepala Bagian Humas SKK Migas Elan Biantoro mengatakan bahwa tim SKK Migas telah memperhitungkan, perpanjangan kontrak tersebut berpotensi akan merugikan negara.

“Maunya pak Kepala dan Tim di SKK tidak diperpanjang kontrak kedua fasilitas produksi itu, sementara permintaan pak JK dan Kementerian ESDM minta diperpanjang seperti itu, Cuma kendalanya banyak,” ungkap

Elan saat dihubungi Aktual.com, ditulis Rabu (3/2).

Dia memaparkan, masa kontrak EPF dan EOE sebagai fasilitas produksi telah berakhir pada Januari lalu, jika diperpanjang, maka akan berakhir pada November akhir tahun ini.

Padaحال dijelaskan, 6 bulan sebelum kontrak habis, lahan tersebut harus dikembalikan kepada lingkungan semula, sehingga tidak ada jaminan tanah tersebut kontraknya diperpanjang.

“Lahan itu posisinya kita sewa, kalau ini diperpanjang, tidak ada jaminan tanah itu akan diperpanjang, kemarin jawabannya ngak jelas dari pemilih tanah atau pemerintah Daerah, mereka bilang tidak mau diperpanjang,” tukas Elan.

Selain itu, aspek lainnya adalah langkah optimalisasi dapat merugikan negara ditengah harga minyak yang turun, jika produksinya digenjut hingga melebihi 200 ribu barel per hari maka tidak akan bertahan dalam jangka waktu yang panjang dan merugikan bagi negara.

“Kalau genjot di depan, nanti kempesnya di belakang. Saya dulu membahas POD nya, mau digenjut 200 ribu barer per hari, seharusnya 100 ribu aja supaya bisa bertahan 7 hingga 10 tahun, manfaat lebih lama. Karena ada kekurangan produksi, maka kita dipaksa pake EPF dan EOE,” pungkasnya. Dadang Syah

## Pertamina Korban Rakyat, Semestinya Harga BBM Rp4.500

Mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diperjualbelikan oleh PT Pertamina saat ini menuai kritik dari berbagai pihak. Pasalnya, harga minyak dunia saat ini terus-menerus mengalami penurunan harga. Sebagai Perusahaan BUMN, seharusnya Pertamina mengutamakan kebutuhan rakyat daripada mencari keuntungan.

Ekonom Ichsanuddin Noorsy mengungkapkan, mekanisme perhitungan yang diterapkan oleh pemerintah saat ini memang

jelas melanggar konstitusi terkait pengaturan harga BBM.

“Pemerintah menyerahkan harga BBM ke mekanisme pasar, padahal konstitusi kita tidak membenarkan itu. Di satu sisi, pada saat harga minyak dunia turun, justru PT Pertamina mempertahankan harga dengan alasan untuk menutupi kerugian di sektor hulu. Nah lagi-lagi rakyat yang menjadi korban,” papar Noorsy ke Aktual.com, Selasa (2/2).

Noorsy menyebutkan, jika pemerintah ingin jujur melakukan perhitungan harga BBM yang wajar saat ini. Mestinya harga BBM jenis premium saat ini hanya berkisar Rp 4.500

“Saya sudah hitung-hitung, kalau

pakai asumsi harga USD30 per barelnya, harga premium mestinya Rp4.500 per liter. Kalau jadi USD15 per barelnya, harga premium mestinya antara Rp2.250-2.500 perliternya. Kalau pakai perhitungan MOPS jadinya Rp3,750,” sebut Noorsy.

Noorsy menyebut, selama ini pemerintah tidak pernah jujur terkait perhitungan dan keuntungan harga BBM.

“Karena tidak ada transparansi perhitungan di Pertamina, disaat harga minyak dunia turun begini kan pasti Pertamina banyak untung. Nah keuntungan yang mestinya dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat justru tidak dibuka,” bebarnya.



Anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti memasuki Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan di Jakarta, Senin (1/2).

## Damayanti Tidak Sendiri

**P**DIP menjadi partai pertama yang menyumbangkan kadernya, untuk mengisi salah satu kamar di Hotel Prodeo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rabu, 13 Januari 2016 menjadi hari buruk bagi Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP. Tanpa ia sadari, ternyata tindak-tanduknya sudah radar Agus Rahardjo Cs.

Bermaksud pulang ke kediamannya di bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan, mantan Kepala Departemen Pertanian dan Perikanan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP itu, malah diringkus oleh tim Satuan Tugas (Satgas) KPK. Penangkapan Damayanti adalah serangkaian kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada hari itu.

Di hari yang sama ada empat pihak yang diamankan Satgas KPK. Selain Damayanti, tiga pihak lagi yang dicokok adalah Dessy A Edwin, Julia Prasetyarini dan Direktur PT Windu Tunggal Utama (WTU), Abdul Khoir. Damayanti sendiri disinyalir menerima 'uang haram' dari Abdul, yang diberikan melalui tangan Dessy dan Julia.

Uang tersebut adalah 'bayaran' untuk Damayanti dalam membujuk Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) IX, Amran HI Mustary. Ya, bekas anak Megawati itu memang mengiming-imingi Abdul dengan proyek pengembangan di Indonesia Timur tepatnya jalan Pulau Seram Wilayah II, Maluku.

Bukan tanpa alasan, Abdul tergiur dengan janji manis Damayanti. Kuasa hukumnya, Haerudin Massaro pun

mengamini jika kliennya dengan senang hati memberikan uang jasa itu ke Damayanti. "Pak, kalau kita nggak ikut sistem di sana, aturan main di sana, boro-boro dapat proyek. Ditengok pun tidak kamu," papar Haerudin, sambil menirukan perbincangannya dengan Abdul, Selasa 26 Januari 2016, di pelataran gedung KPK.

Abdul memang pemain lama yang sudah malang-melintang di dunia proyek konstruksi Maluku. Sudah 10 tahun namanya harum di pulau yang kaya akan rempah-rempahnya itu. Namun nahasnya, 'kongkalikong' dia dengan Damayanti justru berakhir di ruang penyidik KPK.

Ada yang menarik, mengapa pengusahaan kakap seperti Abdul bisa jatuh hati dengan politikus bau kencur seperti Damayanti. Kalau hanya sial, semua orang punya faktor itu. Yang jadi pertanyaan, mengapa Abdul begitu mudahnya jatuh 'ke pelukan' Damayanti. Ada apa?

Usut punya usut, Damayanti





Dessy A Edwin



Julia Prasetyarini



Abdul Khoir

ternyata salah satu kader binaan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), yang memang dekat dengan Puan Maharani. Dimana, saat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 lalu, keduanya sama-sama berangkat dari konstituen Jawa Tengah.

Wanita yang dikenal fasih dalam bidang pertanian itu, memang direkrut oleh Puan untuk mengisi jabatan di DPP partai berlambang banteng. Hal itu pun tak dapat dipungkiri, dan bisa saja dijadikan peluru oleh Damayanti untuk memikat Abdul.

Sampai-samapi, saat menjalani pemeriksaan dengan penyidik KPK, wanita 45 tahun itu tidak segan-segan untuk menyebut kembali nama Puan, dan termasuk sosok Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, bahkan Presiden Joko Widodo.

Nama Puan pun tak lekang disebut oleh Damayanti dalam beberapa pertemuan dengan pengusaha ternama di Maluku itu. Setidaknya, terdapat tiga pertemuan antara ibu empat anak itu dengan Abdul. dan setiap pertemuan, nama Puan tak akan lupa disebut.

Penyebutan nama anak Megawati itu bukan tanpa alasan. Puan pun diketahui dekat dengan Menteri PUPR, Basuki Hadiemoeljono.

Bagaimana Abdul tidak kepincut dengan Damayanti? Wong, orang-orang yang disebut memang diakui bisa melanggengkan keinginan Abdul.

Tentunya, untuk mendapatkan berbagai paket proyek konstruksi di Maluku.

Tak sampai disitu pemikat Damayanti. Untuk meyakinkan Abdul, dia juga mengumbar pengalamannya sebagai mantan Sekretaris Direktur Jenderal Sumber Daya Air di Departemen Pekerjaan Umum (sekarang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Jaringan dia di sana tidak dapat dikesampingkan.

Damayanti dan Abdul setidaknya sudah tiga kali bersua. Salah satu pertemuan terjadi ketika Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto merayakan ulang tahun, pada 2015 lalu. Namun, menurut pengacara Abdul, kliennya baru pertama kali bertemu dengan Damayanti pada September 2015, dimana saat itu keduanya sudah membahas soal proyek.

"Kenal (dengan Damayanti) September 2015. Pertemuan lobi-lobi atau menanyakan sesuatu tentang proyek," kata pengacara Abdul, Haerudin Massaro, di gedung KPK, Selasa 26 Januari 2016.

Pada ranah pemerintah, Amran, Kepala BPJN IX yang sempat merasakan 'kehangatan' ruang penyidik KPK, mengaku ditelisik soal proyek infrastruktur di Pulau Seram Wilayah II. Satu waktu, saat kunjungan kerja Komisi V DPR ke Maluku, tak lupa proyek tersebut ia pesan agar teralokasi dalam anggaran Kementerian PUPR.

Pekerjaan itulah nyatanya jadi

'mainan' Damayanti dengan Abdul. Dengan imbalan 404.000 Dollar Singapura Damayanti mulai kasak-kusuk ke jaringannya di Kementerian PUPR, agar mendorong PT WTU sebagai pelaksana proyek.

Tapi sebelum itu, tentunya ada rancangan dari para penghuni gedung parlemen itu, supaya paket pekerjaan pengembangan jalan Pulau Seram Wilayah II bisa disetujui oleh pemerintah. Grand design-nya, mulai dari mengepul dana aspirasi milik beberapa anggota dewan, hingga bagi-bagi 'jatah'.

Tak tanggung-tanggung, jika berbagai proyek pesanan itu masuk, ada nominal yang harus masuk ke kocek para wakil rakyat. Total anggaran BPJN Maluku Rp 2 triliun, 6 persennya untuk anggota dewan dengan total sekitar Rp 100 miliar.

Satu waktu, pengacara Abdul, Haerudin pun sempat mengungkap bahwa ada 24 dari 54 anggota Komisi V yang ikut dalam 'permainan' Damayanti. "Saya dengar, ada 24 orang. Ada nama-namanya yang terima uang atau nggak. Wallahuallah," kata Haerudin, Rabu 27 Januari 2016.

Khusus 'garapan' Damayanti, faktanya belum ada lelang pelaksanaan proyeknya. Yang ada baru sebatas lelang Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan di Pulau Seram 2, dimana nilai Pagu paket tersebut sebesar Rp 3.746.458.000. ◦

Mochammad Zaky Kusumo-Nebby



**BARESKRIM POLRI GELEDAH RSCM.** Petugas Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri membawa boks berisi dokumen usai melakukan pengeledahan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta, Kamis (4/2). Pengeledahan yang dilakukan selama delapan jam itu bertujuan untuk mengusut kasus perdagangan organ ginjal manusia yang ditemukan di Bandung, Jawa Barat.

## Kasus Jual Beli Ginjal, Polisi Endus Keterlibatan Tiga Rumah Sakit di Jakarta

Bareskrim Polri terus mendalami keterlibatan tiga rumah sakit dalam penyidikan kasus tindak pidana perdagangan orang, dengan modus penjualan organ tubuh manusia berupa ginjal.

Kepala Bagian Analisa dan Evaluasi Bareskrim Kombes Pol Hadi Ramdani mengatakan, seharusnya rumah sakit menanyakan kepada calon pendonor ginjal sebelum dilakukan operasi.

“Ditanyakan motivasinya, mengapa mau mendonor dan siapa yang mempengaruhinya,” ujarnya di Bareskrim Polri, Rabu (3/2).

Sementara kasus yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim ini, pihak rumah sakit tidak melakukan hal itu. “Artinya tidak sesuai SOP-nya, tapi kami akan dalam hal itu,” kata perwira menengah ini.

Dia memastikan, bahwa rumah sakit yang menangani transplantasi ginjal itu berada di wilayah Jakarta.

“Tiga rumah sakit sudah diperiksa yakni C, AW dan C, semuanya berasal dari Jakarta,” ujar dia.

Saat ditanya apakah berasal dari rumah sakit negeri atau swasta, Hadi hanya tertawa seraya berkata, “Ah kalian (wartawan) tahu saja (rumah sakit) yang mana,” ujar dia.

Sebelumnya diketahui, penyidik Direktorat Tindak Pidana

Umum Bareskrim Polri

membekuk tiga pelaku penjual organ tubuh manusia berupa ginjal, yakni Yana Priatna alias Amang, Dedi Supriadi bin Oman Rahman dan Kwok Herry Susanto alias Herry. Mereka sudah menipu setidaknya 15 orang.

Adapun, tiga pelaku hingga kini masih ditahan di jeruji besi Bareskrim Polri. Mereka dibidik dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO juncto Pasal 62 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. WISNU



## Pimpinan Sebut Draft Revisi UU KPK Upaya Pelemahan

Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut isi dalam draft revisi Undang-undang yang disodorkan DPR RI adalah upaya pelemahan institusi. Sebagian besar pemaparan pasal yang diajukan DPR untuk dirubah, bukan sebagai langkah penguatan KPK secara kelembagaan.

“Sebagian besar draft ini pelemahan KPK. Lebih dari 90 persen ini pelemahan dan bukan penguatan,” kata Wakil Ketua KPK La Ode Syarif di gedung KPK, Rabu (3/2).

La Ode pun lantas membacakan salah satu isi dalam draft yang diserahkan DPR, yakni soal prosedur penyadapan. Dimana untuk memulai penyadapan harus ada izin dari Dewan Pengawas.

Dan pembentukan Dewan Pengawas sendiri termasuk salah satu usulan DPR. “Ini kita anggap melemahkan. Kami anggap tidak cocok dengan apa yang dikerjakan KPK selama ini,” kata dia.

Tak hanya soal penyadapan yang dianggap melemahkan. Menurut para komisioner, perubahan soal nominal korupsi sebesar Rp 2 miliar juga dinilai sebagai pelucutan bagi lembaga antirasuah.

Dia menyebut penanganan perkara korupsi tidak hanya terkait besaran uang yang diduga menjadi kerugian negara. Dikatakan La Ode, penanganan itu tidak hanya fokus pada kerugian negara, namun juga pada pelakunya.

“Misalnya anggap saja pejabat tinggi kurang dari Rp1 miliar tapi dengan status kedudukan org tersebut seharusnya tidak melakukan itu,” ujar La Ode. WISNU



## KPK Optimis Kerugian Negara Korupsi QCC Sesuai dengan Audit BPKP



Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penghitungan kerugian negara atas kasus yang menjerat bekas Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino valid, atau sesuai dengan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Terlebih, KPK juga telah melibatkan tenaga ahli dari ITB untuk melakukan penghitungan kerugian negara tersebut. “Tunggu saja dari penghitungan resmi BPKP selesai. Kami sih yakin tiak ada banyak perubahan,” ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Jumat (29/1).

Apalagi, lanjut Laode, cara penghitungan kerugian negara atas kasus RJ Lino sudah berada di rel yang benar. Terlebih, penegak hukum dalam hal ini KPK meminta bantuan BPKB untuk menghitung kerugian negara atas kasus tersebut.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini angka finalnya bisa kita terima,” kata dia.

Berdasarkan hasil analisa perhitungan ahli ditemukan potensi kerugian keuangan negara sekitar 3.625.922 dollar AS atas kasus korupsi yang membelit Lino dalam kasus pengadaan QCC.

Ahli dari ITB menyatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu kontrak dari produsen yang sama menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan.

Dalam hal ini, penyelidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tiga Unit Quay Container Crane di PT Pelabuhan Indonesia II Tahun 2010. *Wisnu*



*Terdakwa kasus korupsi dana bansos di Sumatera Utara (Sumut), Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho (kanan) mengacungkan jempol disaksikan oleh Pdt Gubernur Sumut Teuku Erry Nuradi (kiri) se usai sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/2).*

## Gatot Akui Ada Permintaan Jatah 14 SKPD dari Nasdem

Bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho mengakui adanya permintaan jatah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Partai Nasdem. Permintaan itu terlontar saat pertemuan islah antara Gatot dengan Tengku Erry Nuradi, selaku Wakil Gubernur Sumut di kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta pada Mei 2015 lalu.

Hal tersebut mengemuka ketika Tengku Erry dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Gatot Pujo, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (3/2). Dalam persidangan, di depan Tengku Erry, Gatot menjelaskan, bahwa ada 14 jatah SKPD untuk orang-orang yang notabeneanya berasal dari Partai Nasdem. 10 SKPD untuk Tengku Erry dan sisanya untuk Surya Paloh.

“Kemudian itu yang jadi forum islahnya di Gondangdia, 19 Mei 2015, saya mengatakan redaksional Bang SP (Surya Paloh), dari 55 SKPD cuma kasih 10 saya pikir wajar dan beliau (SP) minta empat SKPD,” ujar Gatot saat menceritakan pembicaraan islah dengan Tengku Erry yang dihadiri oleh Surya Paloh dan OC Kaligis.

Menurut Gatot, salah satu

permintaan Tengku Erry adalah jabatan di Inspektorat. Dan itu disanggupi olehnya. Tapi sayangnya, politikus PKS itu tidak memaparkan SKPD mana yang diincar Surya Paloh.

Namun demikian, dia mengisyaratkan bahwa terkait permintaan SKPD itu akan disampaikan saat pertemuan dengan Surya Paloh, pasca terjadinya islah.

“(Yang) diminta pak Wagub itu Inspektorat, dan Inspektorat memang akan pensiun, iya nggak apa-apa. Beliau menyampaikan pertemuan hari Ahad (Minggu), ‘Rabu ada pertemuan dengan SP. Dan kalau begitu sampaikan ke pak SP, sampaikan saja’,” terang Gatot, sambil menirukan pembicaraannya dengan Tengku Erry.

Meski begitu, usai persidangan Tengku Erry menepis pernyataan Gatot soal SKPD yang disampaikan dalam persidangan. Menurutnya, soal SKPD itu memang menjadi salah satu tugas Wakil Gubernur, dan itu tertuang dalam Undang-undang (UU).

“Jadi gini, ini yang ingin saya luruskan di media. Jadi tidak ada jatah-jatahan, tidak ada permintaan. Yang saya sebutkan itu tugas Wakil Kepala Daerah. Tidak benar, itu saya sebutkan berdasarkan UU,” kata dia usai persidangan. *Wisnu*

# Raja Minyak yang Terancam Bangkrut

Anjloknya harga minyak dunia yang berkepanjangan mengancam ekonomi Arab Saudi. Ditambah lagi “petualangan militer” di Suriah dan Yaman, yang menyedot anggaran. Akibatnya, Saudi menderita defisit anggaran yang besar, dan cadangan devisa pun terkuras.

**J**ika mendengar nama Arab Saudi, yang terbayang adalah kerajaan Arab yang kaya raya berkat minyak bumi. Dari uang minyak, Saudi membangun hotel-hotel megah di sekitar Kabah di Makkah. Para keluarga kerajaan yang berlimpah uang memborong properti mewah, berfoya-foya, dan berbelanja dengan royal di toserba-toserba terkemuka di Eropa dan Amerika.

Tetapi masa kejayaan itu kini terancam berakhir. Penyebabnya, harga minyak bumi yang selama beberapa tahun terakhir menurun, dan terus menurun. Harga minyak bumi anjlok dari tingkat tertinggi selama lima tahun, sebesar 125 dollar AS per barrel pada Maret 2012 dan diprediksi akan turun sangat rendah, menjadi hanya 30 dollar AS per barrel. Dunia mengalami *over supply* minyak dan harga tidak beranjak naik, karena Arab Saudi dan negara-negara OPEC lain tidak mau mengurangi produksi.

Salah satu penyebab merosotnya harga minyak adalah tingginya pasokan *shale oil* di Amerika Serikat (AS). Harga *shale oil* lebih murah dibandingkan dengan minyak mentah konvensional. Faktor penyebab *shale oil* bisa murah adalah adanya terobosan baru di bidang horizontal drilling dan hydraulic fracturing, yang bisa memproduksi *shale oil* terutama di Amerika dalam jumlah yang besar. Jadi, biaya produksi per barrelnya menjadi lebih murah.

*Shale oil* bisa menjadi salah satu sumber energi terpenting pada tahun-tahun mendatang, karena jumlah cadangannya sangat melimpah di bumi ini. Misalnya, Amerika diperkirakan mampu memproduksi

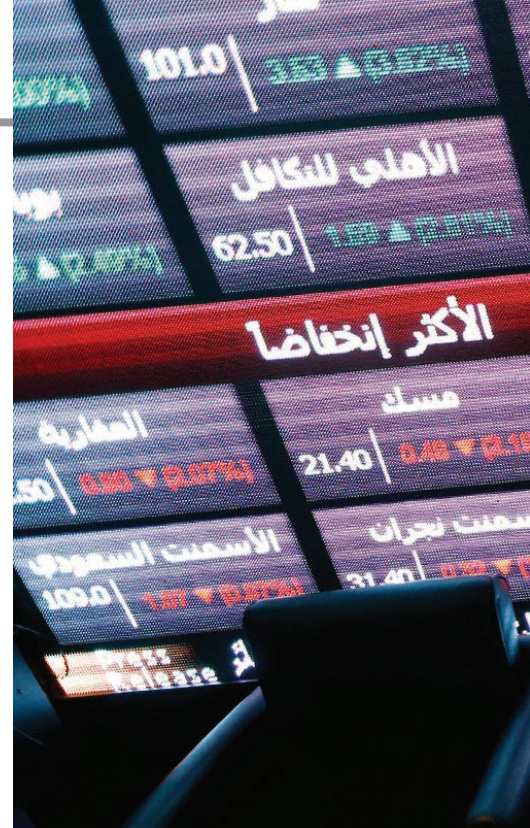
*shale oil* sebesar 1,5 sampai 1,8 triliun barrel. Jumlah ini tiga kali lebih besar daripada cadangan minyak Arab Saudi dan dapat mencukupi kebutuhan minyak Amerika selama 400 tahun.

## Arab Saudi Menjaga Gengsi

Namun, melimpahnya produksi *shale oil* dari AS tidak membuat Arab Saudi, produsen minyak terbesar dunia, mau memangkas produksinya. Seolah-olah “menjaga gengsi,” Saudi enggan menurunkan produksi minyak, yang menyebabkan harga komoditas ini merosot drastis karena pasokan melimpah. Saudi tetap mempertahankan tingkat produksi minyaknya di atas 9,5 juta barrel/hari. Bahkan, Saudi bersedia menurunkan harga jual minyak mereka ke pasar internasional, hanya untuk mempertahankan pangsa pasar yang selama ini dikuasainya.

Anggota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak), seperti Arab Saudi, Iran, Irak, Kuwait, Qatar, Uni Emirat Arab (UEA), Aljazair, dan Libya, semuanya menghadapi penurunan pendapatan yang tajam, akibat penurunan harga minyak. Arab Saudi sangat terpukul, mengingat sekitar 80 persen pendapatan negara berasal dari ekspor minyak bumi. Untuk pertama kalinya sejak 2009, Arab Saudi pun menghadapi defisit anggaran.

Keadaan ini mendorong pemerintah memotong pengeluaran, mengurangi subsidi, menunda proyek-proyek, dan menjual obligasi. Pemerintah menjual obligasi negara setidaknya senilai 15 miliar dollar AS (55 miliar riyal) tahun 2015. Defisit anggaran juga menyebabkan PHK



dalam proyek-proyek di Arab Saudi.

Arab Saudi menyatakan memangkas anggaran subsidi dan berbagai layanan umum sebagai bagian dari langkah pengetatan anggaran, menyusul defisit yang terjadi. Harga bahan bakar minyak untuk konsumen dalam negeri meningkat hingga mencapai 50 persen, meski harga tersebut masih di bawah standar internasional. Subsidi listrik, air, dan minyak tanah juga dipotong, sesudah Saudi mengalami rekor terburuk dalam defisit anggaran tahun 2015.

Perusahaan-perusahaan di Saudi yang melaksanakan proyek-proyek infrastruktur tertunda dibayar selama enam bulan atau lebih, tahun 2015. Penundaan pembayaran meningkat pada 2015, karena pemerintah ingin mengurangi pengeluaran dalam rangka mempertahankan keuangan.

## Cadangan Devisa Merosot

Cadangan devisa Saudi turun 100 miliar dollar AS, menjadi 650 miliar dollar AS. Karena ekspor minyak adalah penyumbang terbesar bagi penerimaan negara, maka defisit APBN Saudi mencapai sebesar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Bahkan, jika tidak



pernah terjadi sejak awal 1990-an.

### Kesinambungan Fiskal

Menurut Direktur IMF Timur Tengah dan Asia Tengah, Masood Ahmed, kepada para wartawan di Dubai, “Mencapai kesinambungan fiskal dalam jangka menengah akan sangat berat, mengingat kebutuhan untuk menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 10 juta orang, yang diperkirakan akan mencari pekerjaan pada tahun 2020 di negara-negara pengeksport minyak di kawasan itu.”

Para pakar memperkirakan, harga minyak yang rendah akan tetap bertahan untuk masa mendatang. “Untuk negara eksportir minyak di kawasan itu, turunnya harga (minyak) telah menyebabkan penurunan pendapatan yang sangat besar, sebesar 360 miliar dollar AS tahun 2015 saja,” kata Masood Ahmed.

Prospek membaiknya harga minyak dalam waktu dekat tampaknya masih suram. Harga minyak jatuh lagi pada 26 Januari 2016, setelah Arab Saudi menyatakan akan tetap mempertahankan belanja modal proyek energi di tengah kelesuan harga. Kontrak di bursa komoditas New York sempat melemah 7,55 persen ke harga 29,76 dollar AS per barel, sedangkan Brent diperdagangkan turun 6,46 persen ke harga 30,10 dollar AS per barel.

Harga minyak terpukul oleh pernyataan Komisaris Saudi Aramco, Khalid Al Falih, setelah reli menembus 32 dollar AS per barel pada akhir pekan sebelumnya. Al Falih mengatakan, rencana investasi BUMN migas Arab Saudi tersebut akan berjalan sesuai rencana, meskipun harga minyak telah merosot tajam sejak pergantian tahun. “Saudi Aramco bisa menanggung beban harga yang rendah untuk waktu yang sangat panjang,” tegas Al Falih.

Tekanan juga muncul dari penurunan konsumsi energi di China. Badan Energi Internasional memproyeksikan konsumsi solar di ekonomi terbesar kedua dunia tersebut akan flat pada 2016, sedangkan konsumsi bensin naik 200.000 barrel per hari. • Satrio Arismunandar

dikendalikan, semula defisit itu bakal melampaui 20 persen terhadap PDB.

Sejak Oktober 2015, Dana Moneter Internasional (IMF) sudah memperingatkan bahwa Arab Saudi mungkin akan kehabisan aset keuangan pada 2020, jika pemerintah terus mempertahankan kebijakan yang ada saat itu. Menurut prediksi IMF, Saudi akan mengalami defisit anggaran sebesar 21,6 persen pada tahun 2015 dan 19,4 persen pada 2016. Maka IMF mendesak Saudi untuk menyesuaikan pengeluaran belanjanya.

Selain itu, ada tuntutan pada OPEC untuk mengurangi produksi dan mendukung harga minyak mentah. Tetapi menurut para pakar, sikap OPEC itu tidak berarti jika tidak ada perubahan kebijakan oleh produsen minyak mentah terbesar, yaitu Arab Saudi.

IMF mengatakan, prospek ekonomi di kawasan Timur Tengah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang paling penting termasuk meruncingnya konflik regional dan harga minyak yang merosot drastis.

Perang saudara yang berkepanjangan di Suriah, yang melibatkan para aktor luar dan militan ekstrem ISIS (Negara Islam di Irak

dan Suriah), mempengaruhi keuangan Saudi. Saudi diketahui mendanai kelompok oposisi bersenjata, yang melawan pemerintah Suriah di bawah Presiden Bashar al-Assad. Saudi ingin menggulingkan Assad, yang dianggap sebagai sekutu dekat Iran yang Syiah.

Pesawat-pesawat tempur Saudi juga membombardir warga Houthi di Yaman, yang adalah penganut Muslim Syiah. Pihak Houthi sebelumnya telah menggulingkan pemerintahan Yaman yang pro-Saudi dan tidak populer di mata rakyat. Saudi menuduh Iran, yang mayoritas berpenduduk Syiah, mendukung aksi militer Houthi. Iran telah membantah tuduhan itu.

Tetapi Saudi, yang memandang dirinya sebagai “kekuatan regional Sunni” di Timur Tengah, sudah memandang Iran sebagai musuh bebuyutan dan pesaing utama dalam memperebutkan pengaruh di kawasan itu. Bahkan bagi Saudi, tampaknya lebih mudah berdamai dengan rezim Zionis Israel yang menjajah Palestina, ketimbang berdamai dengan Iran. Semua “petualangan militer” Saudi yang ceroboh ini menyedot anggaran yang besar. Konflik di Timur Tengah telah melahirkan sejumlah besar masalah dan isu pengungsi, pada skala yang belum

# 'Serangan' Mematikan LGBT



**E**ksistensi pergerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) telah terdengar sejak era 90-an. Komunitas LGBT berlindung dibalik ratusan organisasi masyarakat yang mendukung kecenderungan untuk berhubungan seks sesama jenis.

Hingga akhir tahun 2013 lalu, ada dua jaringan nasional organisasi LGBT yang menaungi 119 organisasi di 30 provinsi seluruh Indonesia. Pertama, yakni "jaringan gay", "waria", dan "laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki lain Indonesia (GWLINA)" yang didirikan di bulan Februari 2007. Jaringan ini didukung oleh organisasi internasional.

Jaringan kedua, yaitu forum "LGBTIQ Indonesia", yang didirikan pada tahun 2008. Jaringan ini bertujuan memajukan program hak-hak seksual yang lebih luas dan memperluas jaringan agar mencakup

organisasi-organisasi pria transgender, perempuan lesbian, wanita biseksual.

Parahnya, di media sosial, (khususnya di Twitter, Facebook, dan Path), komunitas LGBT secara terang-terangan melempar kata tidak senonoh (mesum dan jorok) untuk menarik perhatian sesama jenisnya.

## Cuci Otak

Direktur Jenderal Pendidikan Anak dan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Dirjen PAUD-Dikmas) Kemdikbud Harris Iskandar, mengungkapkan, bahwa fenomena LGBT merupakan sarana pencucian otak yang dilakukan melalui berbagai tayangan film Hollywood, televisi dan internet.

"Diperburuk dengan pendidikan keluarga yang minim. Maka lengkap sudah," beber ia kepada Majalah Aktual, beberapa waktu yang lalu.

Akun komunitas gay tersebut

*Spanduk penolakan terhadap Lesbi dan Homo terpasang di daerah Cigondewah Bandung, Jawa Barat, Rabu (27/1). Penolakan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) oleh sebuah ormas tersebut karena kehadiran LGBT dianggap semakin merebak di daerah Cigondewah.*

mengklaim telah mempengaruhi dan mengajak para remaja Muslim di wilayah se-Jabodetabek hingga Bali untuk melakukan perbuatan yang sangat dilarang di dalam ajaran agama Islam tersebut.

"Anak harus dilindungi dari aktivitas seksual yang menyimpang. Polisi harus pidanakan pengelolanya, karena itu bertentangan dengan norma susila, hukum, dan agama di Indonesia," kata Ketua KPAI, Asrorun Niam Sholeh, kepada Majalah Aktual, baru-baru ini.

Di tempat berbeda, Psikolog Liza Marielly Djaprie mengatakan, penyebab seseorang bisa menjadi



Harris Iskandar

LGBT karena tiga faktor. Yakni, biologis, trauma, dan pergaulan.

Menurut ia, sepatutnya orang tua bisa lebih berperan aktif dalam menyembuhkan penderita LGBT. Caranya yakni, dengan mengajarkan kepada mereka mengenali peranannya di dalam kehidupan. Yaitu, bagaimana seharusnya seorang pria dan wanita itu tidaklah sama.

"Jika ada yang aneh atau ganjil maka lebih baik sang anak diajak berdiskusi bukan langsung dilarang dan dimarahin. Karena jika seperti itu anak tidak akan mendapatkan pemahaman yang tepat. Jadi dengan diskusi kita sebagai orang tua bisa masuk ke pemahaman yang lebih mendalam," kata Dosen Universitas Pancasila tersebut.

### Perhatian Utama Psikolog

Sementara itu, Assessor pada Konsultan Management dari Prima Astha Redana, Dewi Ulfah Arini, MM Psikolog, menerangkan bahwa bisa saja komunitas LGBT menyebabkan penyakit menular. Dan, kasus LGBT, kata ia, menjadi perhatian utama para Psikolog seluruh Indonesia.

"Masalah LGBT ini awalnya timbul dari masalah keluarga. ini merupakan penyakit sosial di mana pola asuh orang tua terhadap mereka tidak bagus, tidak 'aware', yang berujung pada anak tersebut dapat terpengaruh dengan cepat," ujar ia seraya tersenyum.

Selanjutnya, Ulfah memberikan

saran kepada orang tua untuk lebih memperhatikan lingkungan sekitar anak. "Ketika kita melihat tanda-tanda untuk anak-anak kita, yang harus diperbaiki adalah orang tuanya. Yang mereka lihat adalah orang tuanya, jangan menyalahkan lingkungan atau anak. Tapi lihat cara pola asuh dan bagaimana kita mengajarkan agama serta etika kepada anak kita," tegas ia menutup pembicaraan.

### LGBT Harus Jadi Wadah

Di kesempatan berbeda masih terkait LGBT, pakar kesehatan Andrologi, dokter Nugroho dari Rumah Sakit Fatmawati Jakarta Selatan, menerangkan, menjadi kelompok minoritas seperti homoseksual bukanlah kemauan pribadi individu.

"Seseorang yang menjadi kelompok eksklusif homoseksual sebenarnya itu bukan kemauan dia. Siapa coba yang mau menjadi seorang homoseksual?. Sebenarnya mereka juga tidak ingin, semua juga kalau bisa masuk kepada kaum mayoritas yaitu heteroseksual yang menyukai lawan jenis," bebarnya berdasarkan riset buku-buku Kedokteran.

Namun demikian, menurut dokter Nugroho, wadah bagi kaum minoritas tersebut bagus. Yaitu, sebagai tempat konseling bagi kaum LGBT.

"Menurut saya itu bagus. memang mereka akan mendorong orang minoritas pada tempatnya. Kalau mereka menemukan homoseksual eksklusif tentunya mereka membutuhkan tempat di mana lingkungan yang dapat menerimanya," jelas dokter murah senyum tersebut.

### LGBT Komunitas Tertutup

Terus diserang, akhirnya komunitas LGBT buka suara. Forum LGBT Indonesia bersama dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) meminta kepada masyarakat dan khususnya pemerintah Indonesia untuk tidak ada perlakuan diskriminatif dalam berbagai hal, khususnya pendidikan.

"Saya warga negara Indonesia, dan mempunyai hak sama seperti warga negara Indonesia yang

lainnya. Tapi kenapa justru oknum pemerintah yang menyebarkan propaganda diskriminatif," kata Ketua Komunitas Arus Pelangi, Yuli Ristinawati, kepada Majalah Aktual.

Dari pantauan Majalah Aktual, aktivitas komunitas LGBT sangat tertutup. Komunitas Arus Pelangi yang beralamat lengkap di jalan Tebet Utara I-G No.14 RT07/RW01 Jakarta Selatan, terlihat sepi. Takut diinvestigasi wartawan dan masyarakat yang tidak suka, pemilik rumah hingga menurunkan nomer rumahnya.

Bahkan, warga sekitar tidak mengetahui bahwa rumah tersebut merupakan komunitas LGBT. "Jika di sini ada kaum LGBT ya tentu saja tidak boleh," kata seorang warga yang identitasnya dirahasiakan ini.

### Azab untuk Kaum LGBT

Ustad Muhammad Ikrom S.pd memberikan nasihat kepada masyarakat, setiap Muslim berkewajiban untuk berpegang teguh terhadap nilai dan hukum Islam yang berpedoman Al Quran dan Sunah. Tujuannya yakni, agar menjadi manusia yang taat kepada Allah SWT.

Ustad Muhammad mengatakan, bahwa di dalam Islam apapun yang terkait dengan LGBT sangat dilarang. Bahkan, menurut ia, hukumnya haram.

Allah SWT telah berfirman, "Dan kamu tinggalkan istri-istri, yang dijadikan oleh Rabb-mu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas." (QS.26:166)

"Maka tatkala datang azab Kami. Kami jadikan Negeri kaum Luth itu, yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu, dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi." (QS.11:82).

"Dari ayat tersebut Muslim seharusnya sudah paham, bahwa Allah SWT sangat melarang hamba-Nya melakukan kegiatan seperti itu 'Homo'. Hal ini telah terbukti di zaman Nabi Luth yang di mana mereka melakukan hubungan sesama jenis dan tidak menghiraukan ucapan Nabi Luth. Sehingga mereka mendapatkan azab dari Allah SWT yaitu dijadikan batu." o Leonina-Reffy-Ferro

# Rakyat dan Ketimpangan Sosial

Satrio Arismunandar

**P**olitisi, mahasiswa yang berdemonstrasi, aktivis LSM, bahkan media, seringkali mengklaim bahwa aktivitas mereka didasarkan pada niat luhur untuk membela kepentingan rakyat. Tetapi siapakah yang dinamakan “rakyat” itu? Ada beberapa definisi tentang rakyat. Tetapi saya akan memilih definisi dari aktivis pergerakan merangkap politisi budayawan, Erros Djarot, yang saya kutip untuk artikel ini.

Rakyat, menurut Erros, adalah “mereka yang seharusnya bisa berdaya, namun tidak berdaya dikarenakan oleh sistem yang berlaku.” Erros membuat definisi itu ketika ia masih jadi aktivis oposisi pinggir di zaman otoriter rezim Soeharto. Berdasarkan definisi ini, Jokowi, Jusuf Kalla, Wiranto, Prabowo Subianto, Surya Paloh, Setya Novanto, Aburizal Bakrie, Agung Laksono, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, adalah warga negara Indonesia. Namun, mereka bukan “rakyat” seperti yang kita maksudkan.

Pembangunan Indonesia dengan berbagai programnya ditujukan untuk mengangkat kepentingan rakyat, berdasarkan definisi di atas. Membangun manusia Indonesia bukan sekedar urusan ekonomi. Kita tak cukup sekadar membuat perutnya kenyang, tetapi ia juga harus mampu mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya. Orang yang cukup makan dan sehat, namun tidak berpendidikan dan tidak bisa membaca, dia belum berkembang secara budaya.

Oleh karena itu, di tengah derap pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah di berbagai daerah, kita merasa miris mendengar pengakuan jujur dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Wapres mengatakan, rasio ketimpangan sosial (rasio gini) di Indonesia saat ini sudah masuk kategori lampu kuning. Artinya, jika tak segera diperbaiki, bukan tak mungkin ketimpangan akan berimbas buruk, seperti terjadinya konflik.

Menurut Kalla, rasio gini di Indonesia saat ini sudah mencapai 0,41. “Jika ditafsirkan, 1 persen penduduk Indonesia saat ini menguasai hampir 50 persen aset bangsa,” ucap Kalla dalam sambutannya pada acara ulang tahun Universitas Paramadina ke-18 di Jakarta, 13 Januari 2016.

Kalla menyatakan, pemerintah tak tinggal diam menghadapi tingginya rasio gini tersebut. Setidaknya ada dua cara yang sudah dilakukan

selama ini. Pertama, adalah mengoptimalkan pajak. Namun, untuk menggenjot penerimaan pajak, sistemnya juga harus berjalan baik. Untuk itu, pada sektor ini perlu teknologi inovasi agar capaian penerimaan pajak bisa ditingkatkan.

Cara kedua, adalah menaikkan golongan menengah. “Masyarakat harus dibiasakan berwiraswasta. Pemerintah juga sudah mengucurkan Kredit Usaha Rakyat sebanyak-banyaknya dengan bunga kecil,” ujar Kalla. Dia juga memuji layanan ojek berbasis daring, antara lain Go-Jek. Menurut Kalla, inovasi yang mereka lakukan bisa mengangkat harkat para tukang ojek dalam waktu singkat.

Pembangunan biasanya sangat mementingkan aspek ekonomi, sedangkan aspek ekonomi itu sangat mendewakan pertumbuhan. Dalam proses pertumbuhan itulah banyak rakyat yang tertinggal. Mereka terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Pola pembangunan yang tidak seimbang membuat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan sosial makin melebar.

Keprihatinan yang sama juga dinyatakan peneliti ekonomi LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Agus Eko Nugroho. Ia mengaku miris dengan pertumbuhan ekonomi nasional, karena indeks pembangunan manusia terus merosot. “Fakta pertama, indeks pembangunan manusia (Human Development Index) belum menunjukkan perkembangan yang meyakinkan. Dari 188 negara, Indonesia menempati urutan 111,” kata Agus, pada 29 Desember 2015.

Kedua, ketimpangan ekonomi antara kelompok tajir dengan masyarakat dhuafa di Indonesia, menjulang tinggi. Hal ini ditandai dengan peningkatan rasio gini dari 0,3 pada tahun 2000 menjadi 0,41 di 2014. Hal ini memperlihatkan ketimpangan semakin melebar. Ada pertumbuhan ekonomi, tapi tidak diikuti kualitas pembangunan.

Uraian tersebut menggambarkan, strategi pembangunan selama ini belum optimal dalam memecahkan isu kualitas pertumbuhan. Hal ini juga mencerminkan masih jauh dan berlikunya jalan untuk menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk mengatasinya, perlu pemerataan akses dalam konteks infrastruktur sosial dan ekonomi, sebagai salah satu prasyarat dasar menuju pembangunan ekonomi yang berkeadilan sosial. ◦



# aktual.com

TERHANGAT TERPERCAYA

Menyajikan informasi terhangat dan terpercaya,  
disampaikan secara cepat, tepat, benar,  
serta makin progresif!



## INFO & PEMASARAN

 Dedy **081 20 53 8776**  
Rhiza **081 828 0941 009**

 [marketing@aktual.com](mailto:marketing@aktual.com)  
[iklan@aktual.com](mailto:iklan@aktual.com)

memberi anda  
**perspektif**  
yang berbeda ...



aktual.com  
TERHANGAT TERPERCAYA

AKTUAL  
MAGAZINE

aktual BUSINESS

Info Dan Pemasaran :

☎ 081517933376 (Dedy) 081280941009 (Rhiza)

✉ iklan@aktual.com | marketing@aktual.com | sirkulasi@aktual.com

🌐 www.aktual.com